KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN BAUBAU
Kantor: Jalan Yos Sudarso No. 43. Telp. (0402) 2826682 Baubau 93711

S U R A T T U G A S
Nomor: **113** /LPPM-UND/VII/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. RASMUIN , M.Pd**
NIP : 19681231 199403 1 012
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Menugaskan kepada saudara :

Nama : Said Saleh Salihi, SE, MSA, Ak, CA
NIDN : 0909068705
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi

Untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau”**.

Dengan jangka waktu penelitian 1 (satu) Tahun, dari Juli 2018 s/d Maret 2019. Selanjutnya saudara melaporkan hasil penelitiannya ke Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebanyak 1 (satu) buah laporan. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Baubau, 04 Juli 2018

Ketua

Dr. Rasmuin , M.Pd

NIP. 19681231 199403 1 012

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Unidayan
2. Rektor Unidayan
3. Arsip

Said Saleh Salihi

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau

Ali Saifudin

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau

Dwi Wahyuni Dahlan

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Perum BULOG SUB Drive Baubau

Erna

R. Supalal Estihadi

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Aktiva tetap Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Baubau

Atik Suryati

Rafiuddin

Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau

Apriyanti Murih Prasetyo

Analisis Break Even Point Terhadap Penjualan Jasa Sewa Kamar Pada Hotel Calista Beach Kota Baubau

Siti Mustika Masagu

Rosnani Said

Analisis Kesipaan Penerapan Akuntansi Akrual Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau

Wa Ode Yuni Sukmawati

Fitrianti Da'a

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada CV. Sinar Jaya Buana Baubau

Wa Ode Suwarni

Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan, terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Otomotif dan Komponen

UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau

JURNAL ILMIAH EKONOMIKA DAN BISNIS

Pelindung

Dr. Sulhan Manaf., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi

Penanggung Jawab

Wa Ode Nur Ainun., S.E., M.Si

Pemimpin Redaksi

Said Saleh Salihi, SE., M.S.A., Ak., CA

REVIWER

DR. Ria Mardiana Y., S.E., M.Si
DR. Ana Mardiana., S.E., M.Si

Sekretaris

Rasit, SE., M.M

Penerbit

Fakultas Ekonomi
Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Alamat Redaksi :

JL. Sultan Dayanu Ikhsanuddin
No.124 Baubau

Daftar Isi

	Halaman
Pengelola Redaksi	ii
Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar	iv
 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau Oleh : Said Saleh Salihi	1
 Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau Oleh : Ali Saifudin	10
 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Perum BULOG SUB Drive Baubau Oleh : Dwi Wahyuni Dahlan	19
 Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Aktiva tetap Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Baubau Oleh : Erna dan R. Supalal Estihadi	30
 Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau Oleh : Atik dan Rafiuddin	39
 Analisis Berak Even Point Terhadap Penjualan Jasa Sewa Kamar Pada Hotel Calista Beach Kota Baubau Oleh : Apriyanti Murih Prasetyo	49
 Analisis Kesipan Penerapan Akuntansi Akrual Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau Oleh : Siti Mustika Masagu dan Rosnani Said	59
 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada CV. Sina Jaya Buana Baubau Oleh : Wa Ode Sukmawati dan Fitrianti Da'a	72
 Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Otomotif dan Komponen Oleh : Wa Ode Suwarni	82

Kata Pengantar

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

JurnalEkonomika dan Bisnis (JIEB) sat ini menerbitkan Vulture 4, No. 1 Mei 2019 Penerbitan ini menampilkan penulis dengan substansi umum. Para penulis dari masing-masing dosen dan mahasiswa Fakultas ekonomi Unidayan, harapan kami, dengan adanya jurnal ilmiah tersebut, dapat memotivasi baik dosen dan mahasiswa di Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau mapun di luar lingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, dapat memanfaatkan media publikasi karya ilmiah tersebut.

Baubau , Mei 2019

Dekan

DR. Sulhan Manaf, M.Si
NIP. 19621231 198803 1 024

ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BAUBAU

Said Saleh Salihi

Dosen Fakultas Ekonmi Unidayan

A B S T R A C K

This study aims to determine the level of rentability of PDAM Kota Baubau, and to know the effectiveness and condition of PDAM Kota Baubau in working on its source of fund. Analysis of data used is descriptive quantitative analysis is based on the calculation to determine the level of liquidity, profitability, activity. Liquidity PDAM Baubau City seen from the current ratio then PDAM Baubau City in a state of liquidity. From 2015-2016 shows an increasing trend, Liquidity PDAM Baubau City seen from the acid test ratio then PDAM Baubau City in a state of liquidity. From 2015-2016 the trend is increasing. The difference in the high current ratio with the acid test ratio is not too much different, it shows the current assets invested in low inventory, Rentability PDAM Baubau City seen from the rentability of own capital from 2015-2016 the increase or decrease. Especially in 2016 rentability own capital has decreased very dratis when compared with the year 2015

Keywords: Profitability, Ratio

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Baubau

PENDAHULUAN

Perusahaan sesuai dengan UUD 1945 ayat 2 dan 3 adalah perusahaan negara. Perusahaan negara ada yang dikuasai langsung oleh pemerintah pusat yaitu Badan Usaha Milik Negara dan ada yang diatur oleh pemerintah daerah yaitu perusahaan daerah. Perusahaan Daerah adalah badan usaha pemerintah daerah yang pendiriannya didasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) dan modalnya untuk seluruh atas sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan Sriyadi (1991:36).

Menurut Munawir (2014:1) Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan. Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan, sedangkan analisis terhadap laporan rugi laba akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan.

PDAM (Perusahan Daerah Air Minum) didirikan dengan tujuan untuk menyalurkan air minum untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, memupuk pendapatan untuk biaya administrasi, perawatan dan perluasan sistem serta memberi kontribusi pada pemerintah daerah berupa pembagian laba. Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk dinikmati secara merata dan masih merupakan sumber yang sifatnya terbatas tidak lebih menghadapi perkembangan penduduk yang

semakin tinggi. Perusahaan daerah Air Minum bertujuan untuk menyediakan kabutuhan air minum kepada masyarakat, maka perlu dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi yang dipadukan fungsi social. Namun dalam kenyataannya sumber daya dan sumber dana belum dikelola secara efektif dan efesien, hal ini berpengaruh terpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengakibatkan kerugian timbul karena pendapatan tidak bias menutup biaya operasioanl yang mengganggu pada sisitem pelayanan. Maka dari itu, agar tidak terjadi kerugian dan kecurangan dibutuhkan pengendalian internal maupun pengendalian esternal diperusahaan. Pengendalian eksternal dengan menitiberatkan kegiatan apakah penyajian disajikan secara wajar sedangkan pengendalian internal salah satunya dengan cara membuat laporan audit dengan tepat waktu.

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai “alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untukselanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dimata masyarakat tidak dapat disimpulkan selalu baik, masyarakat sering mengeluh terhadap pelayanan karena adanya jatah air bersih yang mengalir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu namun tarif pembayaran yang harus dibayar masih normal. Maka diketahui bahwa adanya kecurangan yang meragikan kas daerah yang mengakibatkan biaya operasioanl yang mengganggu pada sisitem pelayanan dikarenakan adanya manipulasi parktik akuntansi karena kurang perperannya auditor internal terhadap kaulitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut serta didasarkan kenyataan bahwa di lapangan sering terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan didalam mengolah data keuangan sehingga menyajikan laporan keuangan yang tidak wajar dan terjadi kesalahan dalam melakukan pembukuan. Sehingga Penulis mengambil objek penelitian terhadap laporan keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau, maka Penulis ingin mengetahui kondisi keuangan PDAM tersebut yaitu ingin mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo, tingkat rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan ingin mengetahui tingkat aktivitas yaitu untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan dananya penelitian ini brtujuan Untuk Mengetahui tingkat rentabilitas PDAM Kota Baubau, Untuk mengetahui Efektifitas dan Kondisi PDAM Kota Baubau dalam mengerjakan sumber Dananya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Laporan Keuangan

Sedangkan definisi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam bukunya Standart Akuntansi Keuangan 2015 dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi:neraca, laba rugi, laporan keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti laporan arus kas, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan suatu ringkasan dari transaksi- transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan yang biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal.

2. Analisis Laporan Keuangan

Analisa Laporan Keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan Djarwanto,(2008:123).

Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis Analisis Laporan Keuangan adalah analisa mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca/daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan/daftar rugi laba. Selain itu juga ditambahkan daftar yang ketiga yaitu daftar laba yang tidak dibagikan.

Dari pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa analisa laporan keuangan adalah proses penganalisaan/penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca, dan laporan rugi laba beserta lampiran-lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Prosedur Analisis Laporan Keuangan

Sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisa harus dapat menggambarkan aktivitas- aktivitas perusahaan yang tercemin dalam laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain bahwa agar dapat menganalisa laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan maka perlu mengetahui latar belakang dari data keuangan.

4. Metode dan Teknik Analisa

Menurut Munawir (2005:35) mengemukakan beberapa macam metode dan teknik dalam menganalisa laporan keuangan. Metode analisa ada dua macam :

a. Metode Analisa Horizontal

Yaitu analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya.

b. Metode Analisa Vertikal

Yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja,yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut,sehingga hanya dapat diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

5. Analisis Ratio

Analisis ratio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut, Munawir (2005:37).

6. Penggolongan Ratio

Menurut Munawir, (2005:68) pada dasarnya macam atau jumlah angka-angka ratio,itu banyak sekali karena ratio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa,namun demikian angaka-angaka ratio yang ada pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Golongan yang pertama adalah berdasarkan sumber data keuangan yang merupakan unsur atau elemen dari angka ratio tersebut dan penggolongan yang kedua adalah didasarkan pada tujuan penganalisa.

a. Likuiditas

Menurut Muslich, (2003:47) likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas yang sedikit atau tanpa penurunan nilai, serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh.

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid”, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancar atau utang jangka pendeknya. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “illikuid”.

b. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, Bambang Riyanto (2001:35). Sedangkan menurut Munawir, (2005:86) Rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting daripada masalah laba, karena yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung rentabilitasnya.

Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi Adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan khususnya neraca dan laporan rugi laba Wawancara, Adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara Arikunto, (2009:145). Dalam hal ini metode wawancara digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi apabila dianggap kurang jelas.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat likuiditas, rentabilitas, aktivitas yang digunakan sebagai berikut :

1. Rasio Likuidasi

a. *Current Ratio*

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

b. *Acid Test Ratio*

$$\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Rentabilitas

a. Rentabilitas Modal Sendiri

$$\frac{\text{Laba Netto}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. Rentabilitas Ekonomi

$$\frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Rasio Aktivitas

a. Total Asset Turnover

$$\frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Jumlah Aktiva}}$$

b. *Working Capital Turover*

$$\frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Likuiditas

a. *Current Ratio*

Curent Ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Current ratio PDAM Kota Baubau tahun 2015 sebesar 1.47% rasio ini berarti setiap Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp 1.47 aktiva lancar.

Tahun 2016 sebesar 1.95 %, hal ini berarti bahwa setiap Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp 1.95 aktiva lancar. Apabila tahun 2016 dibanding tahun 2015 maka *Curent Rasio* Mengalami Kenaikan sebesar 42%

b. *Acid Test Ratio*

Acid test ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Hasil perhitungan *Acid test ratio* adalah menunjukkan bahwa *Acid test ratio* PDAM Kota Baubau tahun 2015 sebesar 1.41%, rasio ini berarti bahwa setiap Rp 100 utang lancar dijamin dengan Rp 1.41 aktiva lancar. Tahun 2016 *Acid test ratio* sebesar 1.91% bahwa rasio ini berarti setiap Rp

100 utang lancar dijamin dengan Rp 1.91% aktiva lancar. Pada ini mengalami kenaikan rasio sebesar 26%% dibandingkan dengan tahun 2016.

3. Rasio Rentabilitas

Menunjukkan bahwa rasio rentabilitas modal sendiri PDAM Kota Baubau tahun 2015 sebesar -10.31%, rasio ini berarti setiap Rp 100 modal sendiri bisa menghasilkan Rp -.31% laba usaha. Tahun 2016 rentabilitas modal sendiri sebesar sebesar -21.45%, rasio ini berarti setiap Rp 100 modal sendiri bisa menghasilkan Rp -21.45% laba usaha. Pada tahun ini rentabilitas modal sendiri relatif stabil bila dibandingkan dengan tahun 2015. Rentabilitas Ekonomi Rentabilitas Ekonomi merupakan perbandingan antara laba usaha dengan total aktiva. Hasil dari perhitungan rentabilitas ekonomi ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.4 PDAM Kota Baubau.

Menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomis sebesar 5,25%, hal ini berarti setiap Rp 100 yang dioperasikan perusahaan menghasilkan laba sebesar Rp 5,25. Tahun 2016 rentabilitas ekonomis sebesar 5,33% hal ini berarti bahwa setiap Rp 100 yang dioperasikan perusahaan bisa menghasilkan laba sebesar Rp 6.28%. Pada tahun ini mengalami Penurunan Rasio rasio sebesar 178% bila dibandingkan dengan tahun 2015.

4. Rasio Aktivitas

Aktivitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektifitas perusahaan dalam menggunakan dananya.

a. *Total Asset Turnover*

menunjukkan bahwa *total assets turnover* PDAM Kota Baubau pada tahun 2015 sebesar 0,19 kali, berarti bahwa dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 0,19 kali atau setiap rupiah aktiva dapat menghasilkan *revenue* sebesar Rp 0,19 setahun.

Tahun 2016 *total assets turnover* sebesar 0,12 kali, berarti bahwa dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 0,52 kali. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 0,52% bila dibandingkan dengan tahun 2015. menunjukkan bahwa *working capital turnover* PDAM Kota Baubau pada tahun 2015 sebesar 7,08 kali, hal ini berarti modal kerja yang berputar dalam suatu persuklus kas dari perusahaan rata- rata 7,08 kali dalam setahun. Tahun 2016 *working capital turnover* sebesar 3,69 kali, hal ini berarti modal kerja yang berputar dalam suatu persiklus kas dari perusahaan rata- rata 7,56 kali. Pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 69% bila dibandingkan dengan tahun 2016. perhitungan rasio likuiditas, rentabilitas dan aktivitas maka untuk dapat mempermudah dalam membaca dan untuk mengetahui peningkatan dan penurunannya dapat dibuat tabel rasio keuangan dan tabel Common Size Statement sebagai berikut

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Likuiditas

a. *Current Ratio*

Tahun 2015 *Current Ratio* adalah sebesar 259,20%, apabila sewaktu-waktu PDAM ditagih utang lancarnya akan tersedia aktiva yang cukup untuk melunasi. *Current Ratio* sebesar 259,20% menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Kudus dalam keadaan likuid. Sebab bila dihubungkan dengan standar rasio maka pada tahun ini tergolong cukup.

Tahun 2016 *Current ratio* adalah sebesar 1.95%. Pada tahun ini *Current ratio* mengalami kenaikan sebesar 42%, jika dibandingkan dengan *Current ratio* tahun 2016, hal ini disebabkan karena penurunan hutang lancar sebesar 37,21% adalah lebih besar bila dibandingkan dengan penurunan aktiva lancarnya yaitu sebesar 26,68

b. *Acid Test Ratio*

Tahun 2015 *Acid test ratio* adalah sebesar 1.41%, apabila dibandingkan dengan *Current ratio* terdapat selisih 7%, hal ini berarti aktiva lancar yang diinvestasikan dalam persediaan hanya dalam prosentase yang sangat kecil bila dibandingkan dengan yang diinvestasikan dalam unsur aktiva lancar yang lain.

Tahun 2016, *Acid test ratio* adalah sebesar 1.91%, berarti terdapat selisih sebesar 4% bila dibandingkan dengan *current ratio*, sehingga dapat dikatakan bahwa likuiditas PDAM Kota Baubau bila dilihat dari *Acid test ratio* adalah sangat mantap.

2. Rasio Rentabilitas

Tahun 2015, rasio rentabilitas modal sendiri sebesar -10.31% Dengan rentabilitas sebesar ini berarti kreditur tidak rugi bila menginvestasikan uangnya pada PDAM Kota Baubau meskipun labanya sangatt kecil. Apabila dihubungkan dengan standar rasio perusahaan maka PDAM tergolong cukup. Hal ini disebabkan rendahnya modal sendiri yang digunakan dalam mengoperasikan perusahaan dan rendahnya laba yang diperoleh, ini berarti perusahaan banyak mempunyai utang. Untuk itu perusahaan perlu mengurangi utang-utangnya.

Tahun 2016, rasio rentabilitas modal sendiri adalah sebesar -21.45%, pada tahun ini rasio rentabilitas modal sendiri tidak terjadi kenaikan atau penurunan. Dengan demikian kreditur tidak rugi bila menginvestasikan uangnya meskipun labanya sangat kecil. Apabila dihubungkan dengan standar rasio perusahaan tergolong cukup.

3. Rasio Aktivitas

a. *Total Assets Turnover*

Tahun 2015, *total assets turnover* adalah sebesar 0,19 kali. Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka *total assets turnover* lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Rendahnya rasio ini disebabkan banyaknya dana yang tertanam dalam aktiva tetap yang dikarenakan tidak efektifnya manajemen aktiva tetap. Untuk itu perusahaan perlu mengefektifkan manajemen aktiva tetap.

Tahun 2016, *total assets turnover* sebesar 0,52 kali. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 33% jika dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan netto sebesar 12,32 %, selain penjualan meningkat total aktiva juga meningkat sebesar 0,12%. Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka *total assets turnover* masih lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya dana yang tertanam dalam aktiva tetap yang akan berpengaruh terhadap penyediaan dana. Banyaknya dana yang tertanam dalam aktiva tetap karena manajemen aktiva tetap kurang baik. Untuk itu perusahaan perlu memperbaiki manajemen aktiva tetap.

b. *Working Capital Turover*

Tahun 2015, *Working capital turnover* sebesar 7.08 kali. Apabila dihubungkan dengan standar maka tergolong kurang. Rendahnya *working capital turnover* disebabkan tingginya modal yang tertanam dalam piutang. Untuk itu perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola piutang yang berarti penggunaan modal kurang efektif. Untuk itu perusahaan perlu memperbaiki manajemen piutang.

Tahun 2016, working capital turnover sebesar 3,69 kali. Pada tahun ini mengalami kenaikan rasio sebesar 23%, ini disebabkan karena penjualan netto meningkat sebesar 9,32% dari tahun 2016. Apabila dihubungkan dengan standar rasio maka tergolong cukup. Ini disebabkan tingginya modal yang tertanam dalam piutang.

PENUTUP

Kesimpulan

Simpulan analisa rasio likuiditas, rentabilitas dan aktivitas PDAM Kota Baubau adalah sebagai berikut :

- a. Likuiditas PDAM Kota Baubau dilihat dari *current ratio* maka PDAM Kota Baubau dalam keadaan likuid. Dari tahun 2015-2016 menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.
- b. Likuiditas PDAM Kota Baubau dilihat dari *acid test ratio* maka PDAM Kota Baubau. Dari tahun 2015-2016 menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Perbedaan tingginya *current ratio* dengan *acid test ratio* tidaklah terlalu jauh berbeda, hal ini menunjukkan aktiva lancar yang diinvestasikan dalam persediaan rendah.
- c. Rentabilitas PDAM Kota Baubau dilihat dari rentabilitas modal sendiri dari tahun 2015-2016 adanya kenaikan atau penurunan. Apalagi tahun 2016 rentabilitas modal sendiri mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015.
- d. Rentabilitas PDAM Kota Baubau dilihat dari rentabilitas ekonomis dari tahun 2015-2016 mengalami kenaikan atau penurunan. Apalagi tahun 2016 rentabilitas ekonomis mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015.
- e. Rasio aktivitas PDAM Kota Baubau dilihat dari *total assets turnover* dari tahun 2015-2016 mengalami kenaikan. Bila dihubungkan dengan standar rasio perusahaan maka PDAM dalam kondisi Kurang efektif dalam mengerjakan sumber-sumber dananya.
- f. Rasio aktivitas PDAM Kota Baubau dilihat dari *working capital turnover* dari tahun 2015-2016 mengalami kenaikan atau penurunan.

Saran

- a. Hendaknya PDAM Kota Baubau dapat meningkatkan *Current Ratio* yang kurang dengan cara mengoptimalkan aktiva untuk menjalankan usaha.
- b. Rentabilitas dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan volume penjualan supaya laba yang dihasilkan bisa lebih besar.
- c. Hendaknya PDAM Kota Baubau dapat lebih meningkatkan pengelolaan piutangnya agar tidak banyak dana yang menganggur, sehingga efektifitas perusahaan akan lebih baik.
- d. PDAM Kota Baubau diharapkan lebih memperketat dalam memberikan pembayaran kreditnya dengan cara memberikan denda bagi mereka yang terlambat melunasinya.
- e. Diharapkan PDAM Kota Baubau mampu menekan biaya operasinya mengingat biaya dari kegiatan operasi mengalami kenaikan yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi.1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Baridwan, Zaki. 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.

Djarwanto. 2008. *Pokok-pokok Analisa Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

- Eka Fitria Kuswawati. 2013. *Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik dengan Pendekatan Balanced Scorecard*. Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, Iman. 2005. *Aplikasi Analisis, Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standart Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Indrianto, dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Jakarta
- Lukman S, dkk. 2007 *Teori Akuntansi*. Malang : Universitas Brawijaya
- Munawir. 2005. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Muslich, Mohamad. 2003. *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sriyadi. 1991. *Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan Modern*. IKIP Semarang
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung Alfabeta
- Sri Minarti. 2012, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda*. Jurnal Forum ekonomi Vol, XV No. 2 Juli 2012. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Sulistiowati. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal*. Jurnal Monex Vol.6 No 1 Januari 2017
- Suemarso, SR. 2005. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BAUBAU

Ali Saifudin

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

The purpose of this study was to determine and analyze the financial performance of the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Baubau City. Therefore, this research is hoped to be useful as information material for academics and as input for the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Baubau City. The analysis used in this study is the ratio analysis by comparing the present ratio with last year's ratios (historical ratio). The research results show that the liquidity ratio of the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Baubau City in a period of 3 years (2015-2017), namely the current ratio shows good performance because the average value is 330.647%, exceeding the industry average standard, namely 200% and the quick ratio also shows good performance because the average value is 307,273%, exceeding the industry average standard of 150%. The activity ratio of the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Baubau City in a period of 3 years (2015-2017), namely total assets turnover (turnover of total assets) shows poor performance because the average value is 0.096 times below the industry average standard that is 2 times and fixed asset turnover (turnover of fixed assets) also shows good performance because the average value is 0.098 times below the industry average standard of 5 times. The solvency ratio of the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Baubau City in a period of 3 years (2015-2017), namely debt to equity (debt to equity) shows very poor performance because the average value is 3,968%, very far below the average standard. -The industry average is 90% and the debt to total assets (debt to total assets) also shows very poor performance because the average value is 0.949%, very far below the industry average standard of 35%. The profitability ratio consisting of Profit margin (profit margin), Return on assets (rate of return on assets) and Return on equity (rate of return on equity) within 3 years (2015-2017) 2015 is 0%. This is because PDAM Kota Baubau from 2015 to 2017 has never received profit / profit.

Keywords: Financial Performance.

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Baubau

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang terus meningkat dewasa ini dan banyaknya perusahaan sejenis yang muncul membuat persaingan usaha menjadi semakin pesat. Hal ini membuat persoalan manajemen menjadi semakin kompleks sehingga membuat banyak perusahaan kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dianut oleh perusahaan. Tidak jarang perusahaan harus mengubah

kebijakan yang dianut demi memperbaiki dan meningkatkan kebijakan yang saat ini dijalankan.

Penilaian terhadap kinerja perusahaan merupakan cara untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dana yang tersedia. Fahmi (2011:239) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Adanya penilaian ini dimaksudkan agar sedapat mungkin perusahaan menyadari kemungkinan-kemungkinan buruk. Untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan melihat dan mengevaluasi laporan keuangan. Dari laporan Keuangan tersebut dapat dianalisis dengan melihat rasio-rasio keuangan yang dapat menunjukkan posisi kesehatan keuangan, kondisi maupun hasil kerja yang telah dicapai. Analisis keuangan mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang financial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang (Agus Sartono, 2010:113). Dengan demikian, selain digunakan untuk sumber informasi laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggung jawaban yang terjadi di masa yang akan datang dan menentukan cara untuk menyiasatnya sedini mungkin.

Gambaran tentang perusahaan yang kesulitan dalam keuangan dapat diketahui dengan mencermati memburuknya rasio-rasio keuangan perusahaan. Situasi tersebut tentu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada perusahaan karena operasi perusahaan yang tidak efisien akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kesehatan suatu perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau bahwa pada tahun 2015 jumlah pendapatan Rp 7.068.918.771 jumlah beban Rp 9.979.379.795 sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp 2.909.976.063. Pada tahun 2016 jumlah pendapatan Rp 7.469.333.004 jumlah beban Rp 10.570.149.233 dan kerugian yang dialami sebesar Rp 3.099.956.072, sedangkan pada tahun 2017 jumlah pendapatan Rp 8.611.808.490 jumlah beban Rp 11.400.855.873 dan kerugian yang dialami sebesar Rp 2.789.047.383. Unsur-unsur dalam neraca menunjukan bahwa pada tahun 2015 jumlah aktiva lancar Rp 1.036.282.449,34 aktiva tidak lancar Rp 59.388.078.849,66 kewajiban jangka pendek Rp 705.780.416 ekuitas Rp 59.718.580.883 sedangkan pada tahun 2016 jumlah aktiva lancar Rp 1.397.507.738 aktiva tidak lancar Rp 60.499.898.596 kewajiban jangka pendek Rp 715.078.435 dan ekuitas Rp 61.182.327.899 dan pada tahun 2017 jumlah aktiva lancar Rp 2.020.523.402 aktiva tidak lancar Rp 57.253.759.227 kewajiban jangka pendek Rp 311.002.113 dan ekuitas Rp 58.963.280.516.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Laporan Keuangan

Setiap kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan tersebut, dan kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Zaki Baridwan (2011:17) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2008:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Darsono (2009:27) menyatakan bahwa laporan keuangan ialah laporan perusahaan yang disajikan dalam bentuk neraca (*balance sheet*), perhitungan laba-rugi (*income statement*), dan arus kas (*cash flows*).

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No 1 Tahun 2017 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi

Menurut Agnes Sawir (2005:2) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

4. Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2004:3) manfaat atau arti penting laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

- 1) Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu untuk menilai prestasi yang ditujukan pada laba yang telah diperoleh perusahaan, untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang akan diterima dan perkembangan harga saham yang dimiliki.
- 2) Manajer berkepentingan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan sehingga dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki system pengawasan dan menentukan kebijakan yang tepat. Laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban menejer kepada perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
- 3) Para investor memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui prospek keuangan dimasa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya serta keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.
- 4) Para kreditur dan bankers memerlukan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk member atau menolak permintaan kredit suatu perusahaan.
- 5) Pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan, dan juga diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan pemerintah.

5. Bentuk Bentuk Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2017:1) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan terdiri dari :

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan manajemen yang diambil dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sehingga untuk mengukur kinerja keuangan perlu dilaksanakan analisa laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan segala hasil

kebijakan manajemen terangkai dan terdokumentasi secara memadai dalam bentuk informasi keuangan. Oleh karena itu, agar laporan keuangan mampu memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan, perlu dilakukan analisa dan interpretasi atas data- data yang terangkum dalam laporan keuangan Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat atau menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu disebut dengan kinerja keuangan (Sofyan Syafri Harahap 2004:105).

7. Rasio Keuangan

Analisis rasio merupakan suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Oleh karena itu penganalisa harus mampu menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor di masa mendatang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.

Munawir (2004:65) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut

8. Tujuan Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber untuk pengambilan keputusan

Brigham dan Weston (2005:225) menyatakan tujuan dari analisis rasio keuangan adalah membantu manajer keuangan memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas berasal dari laporan keuangan. Analisis rasio keuangan juga dapat mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa diletakkan pada setiap proses pengambilan keputusan

9. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan perusahaan. Dengan menggunakan alat analisa rasio akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standard. Angka-angka rasio keuangan memberikan informasi yang berguna yang dapat mendukung untuk keputusan-keputusan yang akan diambil.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dengan alamat jln. Jendral Sudirman No 35. Kelurahan Wale Kec. Wolio Kota Baubau. Objek penelitian ini yaitu kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu melakukan pengamatan terhadap aktivitas operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yaitu kinerja keuangan untuk melengkapi/mendukung data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dengan atau tanpa bantuan suatu daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara lisan kepada pimpinan atau staf keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data yang telah didokumentasikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau. Dalam penelitian ini berupa data laporan neraca dan rugi laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang bersifat teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan. laporan keuangan.

3. Alat Analisis

Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio (Sofyan Syafri Harahap, 2004:301-308). Analisis rasio dilakukan dengan cara membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio tahun lalu (*historitis ratio*), kemudian memberikan penilaian berdasarkan standar penguran rasio rata-rata industri. Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Rasio likuiditas yang terdiri atas :
 - a) *Current ratio* (rasio lancar)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- b) *Quick ratio* (rasio cepat)

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar-Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio aktivitas yang terdiri atas :

- a) *Total assets turnover* (perputaran total aktiva)

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

b) *Fixed asset turnover* (perputaran aktiva tetap)

3. Rasio solvabilitas yang terdiri atas :

a) *Debt to equity* (hutang terhadap ekuitas)

$$\text{Fixed Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}}$$

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b) *Debt to total asset* (hutang terhadap total aktiva)

$$\text{Debt to total asset} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

4. Rasio profitabilitas yang terdiri atas :

a) *Net Profit margin* (margin keuntungan)

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b) *Return on assets* (tingkat pengembalian aset)

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

a) *Return on equity* (Tingkat Pengembalian Ekuitas)

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau, berikut disajikan tabel rekapitulasi rasio-rasio keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau

Tabel 6.20 Rekapitulasi rasio keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau tahun 2015 sampai 2017

No	Rasio	Tahun			Rata-Rata
		2015	2016	2017	
1	Rasio Likuiditas :				
	<i>Current ratio</i> (rasio lancar)	146,83%	195,43%	649,68%	330,647%
	<i>Quick ratio</i> (rasio cepat)	140,66%	191,61%	589,55%	307,273%
2	Rasio Aktivitas :				
	<i>Total assets turnover</i> (perputaran total aktiva)	0,086 kali	0,092 kali	0,111 kali	0,096 kali
	<i>Fixed asset turnover</i> (perputaran aktiva tetap)	0,087 kali	0,094 kali	0,115 kali	0,098 kali
3	Rasio Solvabilitas :				
	<i>Debt to equity</i> (hutang terhadap ekuitas)	4,884%	4,949%	2,070%	3,968%
	<i>Debt to total asset</i> (hutang terhadap total aktiva)	1,168%	1,155%	0,525%	0,949%
4	Rasio Privitabilitas :				
	<i>Profit margin</i> (margin keuntungan)	0 %	0 %	0 %	0%
	<i>Return on assets</i> (tingkat pengembalian aset)	0 %	0 %	0 %	0%
	<i>Return on equity</i> (tingkat pengembalian ekuitas)	0 %	0 %	0 %	0%

Sumber : PDAM Kota Baubau (Data diolah)

Berdasarkan tabel 6.20 di atas maka dapat diketahui bahwa rasio likuiditas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau yang terdiri atas *current ratio* (rasio lancar) dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) selalu menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata sebesar 330,647%, sedangkan *quick ratio* (rasio cepat) dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) juga menunjukkan angka peningkatan dengan rata-rata sebesar 307,273%. Dalam kurun waktu 3 tahun kinerja rasio likuiditas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Rasio aktivitas yang terdiri atas *total assets turnover* (perputaran total aktiva) dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) menunjukkan peningkatan perputaran, rata-rata perputaran adalah sebanyak 0,096 kali, sedangkan *fixed asset turnover* (perputaran aktiva tetap) dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) juga menunjukkan peningkatan perputaran dengan rata-rata perputaran pertahun sebanyak 0,098 kali. Dalam kurun waktu 3 tahun kinerja rasio aktivitas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya walau dengan nilai yang kecil. Rasio solvabilitas yang terdiri atas *debt to equity*

(hutang terhadap ekuitas) pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 2,083% dan pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 58,173%, dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) rata-rata *debt to equity* (hutang terhadap ekuitas) adalah sebesar 3,968% sedangkan *debt to total asset* (hutang terhadap total aktiva) dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) terus menunjukkan penurunan, rata-rata penurunan *debt to total asset* (hutang terhadap total aktiva) sebesar 0,949%. Dalam kurun waktu 3 tahun kinerja rasio solvabilitas menunjukkan fluktuasi dan penurunan dengan nilai rasio setiap tahunnya sangat kecil. Rasio profitabilitas yang terdiri atas *profit margin* (margin keuntungan), *return on assets* (tingkat pengembalian aset) dan *return on equity* (tingkat pengembalian ekuitas) dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) 2015 adalah 0%. Hal ini disebabkan PDAM Kota Baubau dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak pernah memperoleh keuntungan/laba usaha. Dalam kurun waktu 3 tahun kinerja rasio profitabilitas menunjukkan nilai yang buruk karena tidak pernah memperoleh laba usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Rasio likuiditas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) yaitu *current ratio* (rasio lancar) menunjukkan kinerja yang baik karena nilai rata-ratanya adalah 330,647% melebihi standar rata-rata industri yaitu 200% dan *quick ratio* (rasio cepat) juga menunjukkan kinerja yang baik karena nilai rata-ratanya adalah 307,273% melebihi standar rata-rata industri yaitu 150%.
- 2) Rasio aktivitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) yaitu total assets turnover (perputaran total aktiva) menunjukkan kinerja yang tidak baik karena nilai rata-ratanya adalah 0,096 kali berada dibawah standar rata-rata industri yaitu 2 kali dan fixed asset turnover (perputaran aktiva tetap) juga menunjukkan kinerja yang baik karena nilai rata-ratanya adalah 0,098 kali berada dibawah standar rata-rata industri yaitu 5 kali.
- 3) Rasio solvabilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) yaitu *debt to equity* (hutang terhadap ekuitas) menunjukkan kinerja yang sangat tidak baik karena nilai rata-ratanya adalah 3,968% sangat jauh berada dibawah standar rata-rata industri yaitu 90% dan *debt to total asset* (hutang terhadap total aktiva) juga menunjukkan kinerja yang sangat tidak baik karena nilai rata-ratanya adalah 0,949% sangat jauh berada dibawah standar rata-rata industri yaitu 35%.
- 4) Rasio profitabilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) menunjukkan kinerja yang sangat tidak baik karena tidak pernah memperoleh laba usaha. Nilai *profit margin* (margin keuntungan), adalah 0%, *return on assets* (tingkat pengembalian aset) adalah 0% dan *return on equity* (tingkat pengembalian ekuitas) adalah 0%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan ,maka saran-saran dari penulis sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau hendaknya memperhatikan pencapaian perusahaan khususnya profitabilitas, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tetap.
- 2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau hendaknya dapat lebih

meningkatkan pengelolaan piutang pegawai sehingga efektifitas perusahaan akan lebih baik.

- 3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau hendaknya dapat menekan biaya operasinya mengingat biaya dari kegiatan operasi mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan.
- 4) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Baubau hendaknya memperhatikan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar untuk membuat kebijakan perusahaan dan analisis atas rasio-rasio keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Cetakan Ketiga. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Agus. Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Ke Empat. BPFE UGM. Yogyakarta
- Bambang Riyanto. 2005. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Ke Empat. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Brigham, E.F & Weston, J.F. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi. Ke Sembilan. Jilid 2. Erlangga. Jakarta
- Darsono. 2009. *Manajemen Keuangan*. Nusantara Consulting. Jakarta
- Fahmi Irham. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung
- Gitosudarmono Indriyo dan H. Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*, Edisi Keempat. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Grace Monica Nuruwael. 2013. *Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt.International Nickel Corporation, Tbk. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*. Saleba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Rajawali Pers. Jakarta
- Lukman Syamsudin. 2012. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muh. Alamsyah. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt. Rajawali Jaya Sakti Contrindo Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Muhammad Wahyudin. 2008. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Munawir. S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keempat. BPFE. Yogyakarta
- Prastowo dan Juliaty. 2008. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*. Edisi kedua. Yogyakarta
- Recly Bima Rhamadana. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilain Kinerja Keuangan Pada Pt. H.M Samporna Tbk. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*
- Susan Irawati . 2005. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Ke Satu. PT. Pustaka. Bandung.
- Soemarso S.R. 2004. *Akuntansi Satu Pengantar II*. Salemba Empat.Jakarta
- Sofyan Syafri Harahap. 2004. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan Keempat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 10. Rajawali Pers.Jakarta
- Zaki Baridwa. 2011. *Intermediete Accounting*. BPFE. Yogyakarta

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PERUM BULOG SUB DIVRE BAUBAU

Dwi Wahyuni Dahlan

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau

A B S T R A C K

This study aims to analyze the sales accounting information system at the Sub Divre Baubau Public Corporation. The nalsisi used in this research is a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the accounting information system in the Bulog Sub Divre Baubau Public Corporation has implemented an Accounting Information System that uses a computerized system in recording and reporting accounting information. This system is called the Bulog Accounting Information System. In the sales accounting information system at the Bulog Sub Divre Baubau Public Corporation, the application of the system according to the author is good. While for cash and credit sales information is good enough. This is evidenced by the existence of each sales transaction, whether the functions, documents, records and procedures used are sufficient enough so that in each transaction can be recorded or reported easily. Accounting Information Systems Cash and Credit Sales that are at Perum Bulog Sub Divre Baubau good enough . This can be seen in the function used to carry out its duties and responsibilities such as sales functions, warehouse functions and accounting functions.

Keywords: System , Accounting, Sales.

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Perum Bulog Sub Divre Baubau

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang ini menuntut kemampuan pemimpin perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya perusahaannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat mencapai hal tersebut, informasi yang tepat dan akurat memegang peranan sangat penting. Dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan, informasi akuntansi merupakan salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya perusahaan. Untuk mendapat informasi yang tepat dan akurat, maka diperlukan satu sistem informasi akuntansi yang dibuat menurut pola yang terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

Informasi akuntansi merupakan bagian yang paling penting dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, karena sistem informasi akuntansi berhubungan dengan data keuangan dan transaksi keuangan suatu perusahaan. Adanya sistem informasi akuntansi yang akurat akan membantu manajemen perusahaan dan pihak-pihak diluar perusahaan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan salah satu sub sistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penjualan sehingga tindakan manipulasi terhadap penjualan dapat dihindari.

Pada perusahaan yang penghasilan utamanya berasal dari penjualan produk, antara fungsi penjualan dengan fungsi akuntansi harus tercipta hubungan yang saling mendukung untuk memperoleh informasi akuntansi yang dibutuhkan perusahaan melalui catatan-catatan akuntansi. Dari hasil inilah akan menerima kas sebagai sumber utama pendanaan modal kerja perusahaan.

Perum BULOG *Sub Divre* Baubau adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengembangkan tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan harga dasar pembelian untuk gabah, stabilitas harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Perum BULOG sebagai penyalur raskin di Kota Baubau telah mendistribusikan raskin sesuai kuota di masing-masing distrik atau kecamatan yang ada. berdasarkan data perum bulog *sub dirve* Baubau tahun 2017 tercatat 2.326.275 Kg atau setara dengan 93 persen dari total penerima manfaat. Selain Kota Baubau, Perum Bulog *Sub Dirve* Baubau juga menyalurkan raskin untuk Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara dan Wakatobi.

Perum BULOG *Sub Divre* Baubau merupakan perusahaan yang sangat memerlukan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat mengamankan asetnya serta mampu melakukan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penjualan. Maka dengan banyaknya transaksi yang berhubungan dengan kas, persediaan dan piutang dagang, maka perusahaan harus mampu membuat suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang efektif dan memadai sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan dapat meminimalisasi adanya ancaman manipulasi.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh di lapangan, Perum BULOG *Sub Divre* Baubau menerapkan sistem informasi akuntansi yang sudah menggunakan sistem komputerisasi terhadap pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi baik kredit maupun tunai. Proses pencatatan informasi akuntansi dilakukan secara harian baik itu penjualan tunai maupun kredit sedangkan dalam hal pelaporan informasi akuntansi di lakukan secara bulanan. Sistem ini disebut dengan SIAB (Sistem Informasi Akuntansi Bulog). Sementara untuk sistem informasi akuntansi penjualan tunai maupun kredit Perum Bulog *Sub Divre* Baubau hanya menerapkan 3 fungsi yang terkait yaitu fungsi penjualan, fungsi akuntansi dan fungsi gudang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem

Menurut Azhar Susanto (2013:22) Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sutarmanto (2009:5) Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.

Menurut Jogiyanto (2009:34) Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem baru bisa terbentuk bila di dalamnya terdapat beberapa prosedur yang mengikutinya. Sedangkan menurut (Mulyadi, 2010:5) sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

2. Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Beberapa ahli mendefinisikan informasi sebagai berikut:

Menurut Agus Mulyanto (2009 : 12) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Sedangkan menurut Jogiyanto (2009 : 8) informasi adalah Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Abdul Kadir (2002: 31) informasi adalah sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

3. Akuntansi

Menurut Bodnar (2003 : 1) mengemukakan “akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomis mengenai suatu badan usaha ke berbagai pihak.” Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan akuntansi adalah orang-orang yang cukup kompeten dalam bidangnya agar informasi yang disajikan benar-benar mampu mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

4. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan definisi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

Menurut Gelinas dan Dull (2012:13), Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi terkait dengan aspek keuangan akan kegiatan bisnis. Menurut Romney dan Steinbart (2015:10), Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi data perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

5. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Aktivitas utama perusahaan yang tidak kalah pentingnya adalah penjualan yang merupakan salah satu fungsi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan atau penerimaan perusahaan. Menurut Mulyadi (2010:205), sistem informasi akuntansi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. penjualan merupakan kegiatan yang terdiri dari penjualan barang dan atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai.

6. Pengendalian Internal Atas Penjualan

Bagi setiap perusahaan penjualan merupakan hal yang sangat penting didalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan baik perusahaan jasa, perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Oleh karena itu perlunya pengendalian yang baik terhadap penjualan yang terjadi. Untuk mempermudah dalam pengendalian perusahaan harus menerapkan suatu prosedur yang baik dalam melakukan penjualan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Perum BULOG *Sub divre* Baubau yang beralamat Jl. Betoambari No. 117, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Objek dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penjualan pada Perum BULOG Sub *Divre* Baubau.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapang. Dalam studi lapang ini penelitian dilakukan dengan tiga cara adalah sebagai berikut :

a. Peninjauan langsung (Observasi)

Penulis mengadakan observasi langsung pada tempat penelitian untuk lebih mengarahkan pada masalah penelitian yang dimaksud, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara objektif dalam hal ini di Perum BULOG Sub *Divre* Baubau.

b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pemilik perusahaan, bidang keuangan dan bidang penjualan Perum BULOG Sub *Divre* Baubau (Pedoman wawancara terlampir).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Perum BULOG Sub *Divre* Baubau.

A. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana alat analisis ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Perum BULOG Sub *Divre* Baubau. Prosedur dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Perum BULOG Sub *Divre* Baubau adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem informasi akuntansi penjualan.
- b. Mengetahui prosedur dalam sistem informasi akuntansi penjualan baik penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit.
- c. Menganalisis dengan baik mengenai pengaplikasian sistem informasi akuntansi penjualan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk melakukan kegiatan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai mengenai sistem informasi akuntansi pada Perum Bulog Sub *Divre* Baubau sudah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yang menggunakan sistem komputerisasi dalam pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi. Sistem ini disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB). Dengan adanya SIAB maka pencatatan dapat dilakukan secara online dan cepat serta dapat menghubungkan ke Pusat, Divre, maupun Sub Divre yang lainnya. Sementara itu untuk pencatatan persediaan telah menggunakan Sistem Informasi Logistik (SIL) yang sangat bermanfaat pada Perum BULOG, karena seluruh pencatatan

yang berhubungan dengan persediaan dapat dilakukan pada SIL dan bekerja secara online sehingga dapat diketahui oleh Kantor Pusat, Divre dan Sub Divre.

Perum Bulog Sub *Divre* Baubau merupakan sebuah perusahaan jasa, sehingga penghasilan utamanya adalah berasal dari penjualan raskin. Oleh karena itu, Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang ada pada Perum Bulog Baubau dilakukan secara tunai dan kredit. Untuk mewujudkan adanya sistem informasi penjualan yang baik, sistem penjualan yang diterapkan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian intern, sehingga tujuan pengendalian intern atas penjualan dapat tercapai. Pada sistem informasi akuntansi penjualan di Perum Bulog Sub *Divre* Baubau, penerapan terhadap sistem tersebut menurut penulis sudah baik. Sementara untuk informasi penjualan tunai dan kredit sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya setiap transaksi penjualan, baik itu fungsi, dokumen, catatan dan prosedur yang digunakan sudah cukup memadai sehingga dalam setiap transaksi dapat dicatat atau dilaporkan dengan mudah.²

2. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dan Kredit Pada Perum Bulog Sub Divre Baubau

Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi penjualan guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan membandingkan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan kredit pada Perum Bulog Sub *Divre* Baubau dengan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan kredit berdasarkan teori Mulyadi berbasis Pengendalian Internal. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dan kredit pada Perum Bulog Sub *Divre* Baubau dibandingkan dengan unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan kredit menurut teori adalah sebagai berikut : Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada Perum Bulog Sub *Divre* Baubau sama dengan fungsi yang terkait dalam penjualan kredit. Fungsi-fungsi ini meliputi fungsi penjualan, fungsi gudang dan fungsi akuntansi. Fungsi penjualan bertanggung jawab menerima order dari pembeli, mengisi nota penjualan tunai dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, menerbitkan surat permintaan pembayaran/pemindahbukuan (SPP) harga gabah/beras, membuat jadwal pengiriman dan pengecekan barang, SPP biaya pembelian hingga kegiatan administrasi. Fungsi Akuntansi bertugas untuk mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan seluruh penjualan dan melaporkannya ke kantor pusat dengan sistem online yaitu menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB), serta membuat segala rekap yang nantinya akan dicocokkan dengan laporan keuangan yang sebelumnya telah dimasukkan pada Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB).

3. Dokumen-Dokumen yang Digunakan dalam Penjualan Tunai dan Kredit Pada Perum Bulog Sub Divre Baubau

Dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai pada Perum Bulog Sub *Divre* Baubau adalah permohonan kontrak pengadaan beras, surat perintah kerja, surat permintaan pembelian, surat terima perintah terima barang, surat perintah pemeriksaan kualitas, kuitansi SPP, rekap penerimaan barang Bukti Timbang Pemasukan Beras (GDIM), Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahbukuan (SPP) untuk biaya opslag, bukti uji timbang lembar hasil pemeriksaan kualitas, surat perintah setor (SPS), nota intern dan surat perintah penyerahan barang (SPPB). Sementara untuk penjualan kredit dokumen yang digunakan yaitu Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order* (DO), GD1K, Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), MDO, MBA-0, MBA-1 dan nota debit.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan menurut teori adalah faktur penjualan, pita register kas, *Credit Card Sale Slip*, *Bill Of Lading*, bukti setor bank dan rekap harga pokok penjualan. Berdasarkan hasil penelitian, dokumen yang digunakan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau sudah sesuai dengan teori. Hal ini dapat dilihat pada dokumen Surat Perintah Setor (SPS) memiliki fungsi yang sama dengan bukti setor bank. Selain itu, dokumen rekap harga pokok penjualan yang digunakan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dengan yang ada dalam teori sama, yaitu digunakan untuk merekap harga pokok penjualan selama periode tertentu. Dokumen digunakan dalam transaksi penjualan tunai pada Perum Bulog Sub Divre Baubau sudah cukup baik tetapi akan lebih baik lagi jika ada pita register kas, dimana dokumen ini dihasilkan oleh mesin register kas yang dioperasikan oleh bagian kasir setelah terjadi transaksi penerimaan uang dari pembeli sebagai pembelian atas barang dan juga sebagai dokumen pendukung untuk meyakinkan bahwa faktur tersebut benar-benar telah dibayar dan dicatat dalam register kas. Hal ini sangat baik bagi Perum Bulog Sub Divre Baubau karena dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi pada perusahaan.

4. Prosedur yang Digunakan dalam Penjualan Tunai dan Kredit Pada Perum Bulog Sub Divre Baubau

1. Prosedur Penjualan Tunai

Prosedur sistem informasi akuntansi penjualan tunai pada Perum Bulog Sub Divre Baubau yaitu:

a. Prosedur Order Penjualan

Menurut teori prosedur order penjualan dilakukan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan faktur penjualan tunai bernomor urut cetak. Sedangkan prosedur order penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi penjualan sekaligus rangkap fungsi kas dengan menggunakan nota pembayaran. Prosedur order penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau seharusnya dilakukan oleh fungsi penjualan saja, tidak perlu fungsi kas, karena fungsi kas bertugas sebagai penerima kas dari pembeli.

b. Prosedur Penerimaan Kas Menurut teori prosedur penerimaan kas dilakukan oleh fungsi kas menerima uang pembayaran dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas dan membubuhi cap lunas pada faktur penjualan tunai. Sedangkan prosedur penerimaan kas pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi penjualan menerima uang pembayaran dengan menggunakan nota pembayaran.

c. Prosedur Pencatatan Penjualan Tunai Menurut teori prosedur pencatatan penjualan tunai dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan mencatat transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Sedangkan prosedur pencatatan penjualan tunai pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi penjualan dengan mencatat penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Prosedur pencatatan penjualan tunai seharusnya dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan mencatat transaksi penjualan tunai kedalam jurnal penjualan dan penerimaan kas bukan hanya jurnal penerimaan kas saja.

d. Prosedur Penyetoran Kas ke Bank Prosedur penyetoran kas ke bank menurut teori dan prosedur pencatatan kas ke bank pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan menyetorkan uang dari hasil penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas Menurut teori prosedur penerimaan kas dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank oleh

fungsi kas. Sedangkan prosedur pencatatan penerimaan kas pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi penjualan dengan mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas. Seharusnya prosedur pencatatan penerimaan kas dilakukan oleh fungsi akuntansi agar tidak terjadi perangkapan fungsi.

e. **Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan**

Menurut teori prosedur pencatatan harga pokok penjualan dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Hal ini sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dimana prosedur pencatatan harga pokok penjualan dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan.

2. **Prosedur Penjualan Kredit**

Prosedur sistem informasi akuntansi penjualan Kredit pada Perum Bulog Sub Divre Baubau yaitu:

a. **Prosedur Order Penjualan**

Menurut teori prosedur order penjualan dilakukan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan faktur penjualan tunai bernomor urut cetak. Sedangkan prosedur order penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi penjualan sekaligus rangkap fungsi kas dengan menggunakan nota pembayaran. Prosedur order penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau seharusnya dilakukan oleh fungsi penjualan saja, tidak perlu fungsi kas, karena fungsi kas bertugas sebagai penerima kas dari pembeli.

b. **Prosedur Pengiriman.**

Menurut teori prosedur pengiriman dilakukan oleh fungsi pengiriman dengan mengirimkan informasi dalam surat order pengiriman yang diterima. Sedangkan prosedur pengiriman pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi gudang. Seharusnya prosedur pengiriman dilakukan oleh fungsi pengiriman agar tidak terjadi perangkapan fungsi.

c. **Prosedur Penagihan**

Menurut teori prosedur penagihan dilakukan oleh fungsi penagihan dengan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli tetapi prosedur penagihan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi penjualan.

d. **Prosedur Pencatatan Piutang**

Menurut teori prosedur pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi dengan akuntansi dengan mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang tetapi prosedur pencatatan piutang pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh fungsi penjualan. Seharusnya prosedur pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi agar tidak terjadi perangkapan fungsi.

e. **Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan**

Menurut teori prosedur pencatatan harga pokok penjualan dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Hal ini sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dimana prosedur pencatatan harga pokok penjualan dilakukan oleh fungsi akuntansi dengan membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan.

5. Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Penjualan Tunai dan Kredit Pada Perum Bulog Sub Divre Baubau

Catatan yang digunakan dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dan Kredit pada Perum Bulog Sub Divre Baubau adalah jurnal umum, buku besar dan kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat penjualan tunai maupun kredit. Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan menurut teori adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu gudang, kartu piutang dan kartu persediaan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual dan untuk mencatat persediaan barang yang ada digudang. Catatan akuntansi yang digunakan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika Perum Bulog Sub Divre Baubau menggunakan jurnal penjualan, kartu piutang. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan selama jangka waktu tertentu. Perusahaan akan mudah memperoleh informasi tentang jumlah penjualan yang terjadi dari penjualan tunai tersebut, bukan dari jurnal penerimaan kas saja. Selain itu kartu piutang juga akan membantu perusahaan mengenai rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya.

6. Pengendalian Internal Atas Penjualan

Unsur pokok sistem pengendalian intern dalam penjualan tunai dan kredit adalah sebagai berikut:

1. **Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab**
Struktur organisasi menurut teori yaitu harus dipisahkan fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya, suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Struktur organisasi pada Perum Bulog Sub Divre Baubau memang sudah memisahkan tanggung jawab, akan tetapi pada prakteknya masih ada perangkapan fungsi yaitu fungsi penjualan merangkap fungsi kas. Transaksi penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dilakukan oleh penjualan rangkap fungsi kas. Hal ini jika tidak dilakukan pengendalian intern yang baik dengan cara memisahkan fungsi fungsi yang terkait, maka besar kemungkinan akan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh fungsi penjualan.
2. **Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan**
Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan menurut teori harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang untuk menunjukkan keabsahan dokumen. Menurut teori, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan terdiri dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan "lunas" pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita kas register pada faktur penjualan tunai, pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda panah pada faktur penjualan tunai. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau belum baik karena dalam menerima order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir nota pembayaran, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penjualan yang seharusnya diotorisasi fungsi kas dengan menggunakan nota pembayaran, dan pada saat pencatatan kedalam buku jurnal juga dilakukan oleh fungsi penjualan.
3. **Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi**

Menurut teori, praktik yang sehat pada sistem penjualan tunai maupun kredit adalah faktur penjualan bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi penjualan. Secara periodik dilakukan perhitungan fisik kekayaan dengan catatannya. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya. Transaksi penjualan dilaksanakan dari awal sampai akhir tidak dilakukan oleh satu orang fungsi. Memberikan cuti bagi karyawan yang berhak. Pada Perum Bulog Sub Divre Baubau menggunakan nota pembayaran dan diserahkan oleh fungsi penjualan. Setiap minggu jumlah kas yang diterima disetor seluruhnya ke bank. Transaksi penjualan pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dari awal dilakukan oleh satu orang fungsi yaitu fungsi penjualan. Perum Bulog Sub Divre Baubau memberikan cuti bagi karyawan yang berhak jika ada kepentingan keluarga atau sakit.

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya
Unsur karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting, karena jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten maka perusahaan melakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut pekerjaannya, melakukan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan. Pada Perum Bulog Sub Divre Baubau untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, perusahaan melakukan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut pekerjaannya, melakukan *training* bagi calon karyawan untuk mengetahui seberapa besar keahlian dan keterampilan serta tanggung jawab yang dimiliki terhadap pekerjaan yang telah diberikan. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten pada Perum Bulog Sub Divre Baubau dengan yang ada pada teori kurang lebih sama.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditulis kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi akuntansi pada Perum Bulog Sub Divre Baubau sudah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yang menggunakan sistem komputerisasi dalam pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi. Sistem ini disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi Bulog. Pada sistem informasi akuntansi penjualan di Perum Bulog Sub Divre Baubau, penerapan terhadap sistem tersebut menurut penulis sudah baik. Sementara untuk informasi penjualan tunai dan kredit sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya setiap transaksi penjualan, baik itu fungsi, dokumen, catatan dan prosedur yang digunakan sudah cukup memadai sehingga dalam setiap transaksi dapat dicatat atau dilaporkan dengan mudah.
2. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai dan Kredit yang pada Perum Bulog Sub Divre Baubau cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada :
 - a) Fungsi yang digunakan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti fungsi penjualan, fungsi gudang dan fungsi akuntansi.
 - b) Dokumen-dokumen yang digunakan sudah lengkap seperti permohonan kontrak pengadaan beras, surat perintah kerja , surat permintaan pembelian, surat terima perintah terima barang, surat perintah pemeriksaan kualitas, kuitansi SPP, rekap penerimaan barang Bukti Timbang Pemasukan Beras(GDIM), Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahbukuan (SPP) untuk biaya opslag, bukti uji timbang lembar hasil pemeriksaan kualitas, surat perintah setor (SPS), nota intern dan surat perintah penyerahan barang (SPPB) Sementara untuk penjualan kredit dokumen yang

digunakan yaitu Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order* (DO), GD1K, Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), MDO, MBA-0, MBA-1 dan nota debit.

- c) Prosedur yang membentuk sistem penjualan tunai dan kredit sudah memadai akan tetapi terdapat beberapa bagian yang memiliki tugas rangkap seperti prosedur penerimaan kas yang dilakukan oleh fungsi penjualan yang seharusnya dilakukan oleh fungsi kas
- d) Catatan akuntansi yang digunakan untuk penjualan tunai maupun kredit sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika Perum Bulog Sub Divre Baubau menggunakan jurnal penjualan dan kartu piutang

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan Perum Bulog Sub *Dirve* Baubau sebagai berikut:

1. Untuk memperketat pengawasan, sebaiknya bagian pengawasan Perum Bulog Sub *Dirve* Baubau harus melakukan pemeriksaan secara tiba tiba atas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pada karyawan.
2. Sebaiknya perusahaan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadi perangkapan pembagian tugas di setiap bagian perusahaan. Sebaiknya pencatatan penjualan dapat terintegrasi secara langsung pada masing- masing catatan dan bagian agar hasil dapat lebih *up to date* tidak menunggu bagian *customer service* merekap penjualan terlebih dahulu.
3. Untuk menghasilkan sistem informasi akuntansi penjualan yang baik Perum Bulog Sub *Dirve* Baubau sebaiknya perlu mengikuti bagan alir (*flow chart*) penjualan tunai maupun kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. 2002. Pengenalan Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta.

Agus Mulyanto. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Ayu Mandila. 2010. *Evaluasi Sistem Penjualan Kredit pada Perum Bulog Sub Divre Surakarta*. Fakultas Ekonomi: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Azhar Susanto. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Gramedia.

Belkaoui, A.R. 2000. Teori Akuntansi. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Haryadi, Dedi, dkk. 1998. Tahap Perkembangan Usaha Kecil. Bandung: Akatiga.

Bodnar, George H, William S, Hopwood, 2003. "Sistem Informasi. Akuntansi", PT. Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.

———, 2010. Accounting Information. System. 10 th edition. United State Of America: Pearson Education Inc.

Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.

Diana Anastasia, Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan,, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta.

Dwi Cahyani Ratnasari. 2006. sistem informasi akuntansi penjualan pada koperasi Surya Sekawan Asy Syifa' RSI Aisyiyah Malang.

Effraim Turban, R.kelly rainer,jr. Richard e.pother. 2006. Pengantar Teknologi. Informasi. Salemba infotek. Jakarta

- Gelinas, Ulrich dan Dull. 2012. *Accounting Information System*. South Western Cengage Learning. USA: Natorp Boulevard Mason.
- Jogiyanto. 2009. *Analisis dan. Desain. Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi. Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.
- _____, 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.
- Rizal Effendi. 2013. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Romney Marshall, 2003, *Accounting Information System, Ninth Edition, New. Jersey Pretice Hall*.
- Romney, Marshall B dan Steinbart Paul J. 2015. *Accounting Information System. Global Edition*. Twelfth Edition. England: Person Education Limited
- Skousen, Stice, 2001. *Akuntansi Keuangan Menengah. Edisi Kesembilan, Jilid. Satu, Terjemahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman. 2009. *Pengantar teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SEJAHTERA BAUBAU

Erna

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau

R. Supalal Estihadi

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

The application of accounting to an entity must be in line with the prevailing accounting provisions / generally accepted so that users of accounting information can easily understand the intended purpose. Therefore, Statement of Financial Accounting Standards No.16 regarding fixed assets can be a solution for the accounting treatment of fixed assets that are uniform. This study aims to determine and analyze the application of fixed asset accounting for Savings and Loans Cooperatives (KSP) Baubau Prosperous. The results of this study are expected to be used as input and information for the Prosperous Loan Cooperative (KSP) Baubau in the application of accounting for its fixed assets.

Research results show the application of fixed assets between Savings and Loans Cooperative (KSP) Baubau Prosperous with PSAK No. 16 starting from the procurement of fixed assets, expenses after the acquisition period, depreciation of fixed assets and disposal of fixed assets, which are not in accordance with PSAK No. 16 of 2017, namely depreciation of fixed assets. Depreciation of fixed assets is not appropriate because Prosperous Savings and Credit Cooperatives (KSP) Baubau does not determine the residual value of the fixed assets it owns.

Keywords: Application of Fixed Assets.

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Baubau

PENDAHULUAN

Aktiva tetap yaitu aktiva berwujud yang dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (SAK No.16 2015). Aktiva tetap biasanya merupakan bagian investasi yang cukup besar dalam jumlah keseluruhan aset perusahaan. Besarnya investasi yang ditanamkan dalam aktiva tetap menjadikan aktiva tetap itu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Tidak hanya pada penggunaan dan operasinya saja tetapi juga dalam pengelolaan akuntansinya.

Agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang lazim, aset tetap harus dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan meliputi semua pengeluaran- pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset dan pengeluaran- pengeluaran lain sehingga aset siap untuk digunakan. Biaya perolehan diukur dengan kas yang dibayarkan pada suatu transaksi secara tunai. Dalam hal aset tidak dibayar dengan kas, maka biaya perolehan ditetapkan sebesar nilai wajar dari aset yang diperoleh atau aset yang diserahkan mana yang lebih layak berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Apabila biaya perolehan telah ditetapkan maka

biaya perolehan tersebut akan menjadi dasar untuk akuntansi selama masa pemakaian aset yang bersangkutan (Al.Haryono Jusup, 2005:135).

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera adalah merupakan lembaga keuangan Non Bank yang berbentuk Koperasi dengan kegiatan usaha menyediakan jasa peminjaman dan penyimpanan dana untuk anggota pada khususnya. Tujuan adanya koperasi ini adalah agar anggotanya mendapatkan pinjaman dana dengan mudah. Koperasi Sejahtera ini juga memiliki asset-asset yang berperan penting dalam mendukung jalannya usaha untuk mencapai tujuannya dan salah satu bentuk investasi yang dimiliki adalah aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan normal Koperasi. Aktiva tetap Koperasi Sejahtera yaitu tanah, bangunan gedung kantor, Komputer, Kendaraan Bermotor, peralatan kantor dan rumah tangga.

Dari aktiva tetap yang dimiliki Koperasi Sejahtera Baubau, beberapa kendala terkait dengan pengelolaan aktiva tetap yaitu masalah pengakuan, pengadaan, pengukuran dan pengungkapan yang mempengaruhi tingkat produktivitas Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dalam melakukan kegiatan operasional, hal ini ditandai dengan pencacatan koperasi yang tidak lengkap, hal ini ditandai oleh kurangnya produktifitas aktiva tetap seperti (Komputer) yang penggunaannya tidak didasarkan pada umur manfaat dan optimalisasi dari segi efisiensi dan efektivitas, dimana komputer tersebut masih digunakan tanpa mempertimbangkan kebijakan akuntansi aktiva tetap dalam kegiatan operasional koperasi.

Rangkaian permasalahan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera tersebut diatas, adalah belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan terkait dengan pengelolaan aktiva tetap menegaskan bahwa aktiva tetap perusahaan harus dikelola sesuai dengan standar akuntansi keuangan, baik dalam proses pengadaan, maupun proses pencacatan aktiva tetap pada koperasi simpan pinjam sejahtera. Oleh karena itu aktiva tetap harus ditangani dengan tepat dan perlu diadakan analisis dalam pengelolaannya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem akuntansi aktiva tetap pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Koperasi

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1) Menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Kasmir (2004:270) koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Berdasarkan dari kedua pengertian di atas bahwa sangat jelas bahwa koperasi merupakan suatu badan yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan kekeluargaan serta berdasarkan tolong menolong yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut.

2. Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi bersifat demokratis, menjunjung tinggi kebersamaan, bersifat kekeluargaan dan keterbukaan. Menurut Amir Machmud (2001:3) mengatakan ciri umum koperasi sebagai organisasi sosial adalah adanya:

- 1) *Cooperative group*, yaitu sekelompok orang yang terikat sekurang-kurangnya satu kepentingan dan tujuan yang sama.
- 2) *Self help*, artinya menolong diri sendiri dalam kelompok.
- 3) *Cooperative enterprise*, artinya untuk mencapai tujuan kelompok dengan membentuk

usaha bersama, yang dimiliki, dimodali dan dikelola bersama.

- 4) *Member promotion*, yaitu sasaran utama dari usaha bersama ini adalah memajukan ekonomi anggota.

3. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

- 1) Landasan idiil adalah Pancasila yaitu kelima sila dari Pancasila yaitu sila KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan harus dijadikan dasar untuk dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut menjadi sifat dan tujuan koperasi serta selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.
- 2) Landasan struktural dan landasan gerak, landasan struktural adalah Undang- Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
- 3) Landasan operasional koperasi adalah GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pokok umum pembayaran nasional yang akan memberikan arah perjuangan negara dan rakyat Indonesia.

4. Tujuan dan Nilai-Nilai Koperasi

Koperasi harus tetap hidup dan berkembang, jangan sampai terlindas dengan sistem ekonomi kapitalistik yang berpihak kepada pemilik modal, dan dari pihak pimpinan kedinasan harus tetap memperhatikan pembinaan koperasi. Karena menurut pengalaman dalam pembinaan koperasi pada umumnya, keberhasilan koperasi karyawan dipengaruhi oleh kerjasama dan keserasian dari ketiga pilar yaitu pilar pimpinan kedinasan (tempat anggota bekerja), pilar pengurus dan pengawas dan pilar anggota.

Menurut Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- 1) Rasa solidaritas
- 2) Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri)
- 3) Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna kepentingan bersama
- 4) Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- 5) Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan sosial.

5. Jenis-Jenis Koperasi

Dalam aktivitas dan perkembangannya, koperasi mempunyai berbagai macam kegiatannya sesuai dengan kebutuhannya. Bernhard Limbong (2012:139) menjelaskan bahwa koperasi dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya, beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

- 2) Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggotanya yang bekerja di sector usaha produksi seperti petani, pengrajin, peternak dan sebagainya.
- 3) Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran dan lain-lain.
- 4) Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.
- 5) Koperasi single purpose dan multi purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi multi purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi simpan pinjam dan konsumsi, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

6. Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Slamet Sugiri (2009:137) berpendapat bahwa aktiva tetap adalah asset berwujud yang tujuan pemilikannya adalah untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan (Sofyan Syafri Harahap 2002:20).

Soemarno S.R (2005:20) menjelaskan bahwa aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan perusahaan yang dimiliki dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar. Sedangkan Al.Haryono Jusuf (2005:153) menjelaskan bahwa aktiva ini digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

7. Klasifikasi Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan asset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, dimana asset tersebut mempunyai umur ekonomis yang lebih dari satu tahun. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 tahun 2017 untuk mengklasifikasikan aset tetap didasarkan pada pengelompokan aset yang dimiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas.

Menurut Al. Haryono Jusuf (2005:156), aktiva tetap digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu Tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan.

- 1) Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung- gedung.
- 2) Perbaikan tanah, seperti jalan-jalan diseperti lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah.
- 3) Gedung, seperti gedung yang digunakan untu kantor, toko, pabrik, dan gudang.
- 4) Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin kendaraan,dan maubel.

8. Pengelolaan Aktiva Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun. Dari pengertian aktiva tetap tersebut, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah :

- 1) Merupakan aktiva berwujud
- 2) Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun
- 3) Digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali

Menurut SAK ETAP No 15 tahun 2009 bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu dan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, yaitu tanah, mesin-mesin, kendaraan, gedung, dan peralatan.

9. Kajian Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Donald (2009) Tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap PT. Hasjrat Multifinance Manado. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aktiva tetap yang dilakukan pada PT. Hasjrat Multifinance Manado sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Hasil penelitian yang bahwa PT. Multifinance Manado hanya mencatat perolehan aktiva tetap, dicatat sebesar harga beli sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aktiva tetap tersebut dianggap sebagai biaya operasional, sekalipun tidak semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan aktiva tetap dicatat sebesar harga beli, ada juga aktiva tetap yang dicatat sesuai dengan harga perolehan (sudah termasuk harga beli, biaya pengiriman, asuransi dan pajak). Hal tersebut perlu adanya penyeragaman yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, agar pencatatan harga perolehan aktiva tetap sesuai dengan SAK, sehingga tidak akan terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Baubau, yang beralamat di jalan R.E Martadinata NO 1B Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau

Objek penelitian tentang penerapan akuntansi aktiva tetap pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Baubau

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengamatan (Observasi), yaitu melakukan pengamatan terhadap aktivitas pegawai PT. Putindo Bintech Kabupaten Buton yang berhubungan dengan penerapan akuntansi aktiva tetap.
- 2) Wawancara (*interview*), yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu dalam Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang pengelolaan aktiva tetap yang meliputi pengadaan aktiva tetap, pengeluaran setelah masa perolehan, penyusutan aktiva tetap, penghentian dan pelepasan aktiva tetap.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang telah didokumentasikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau. Dalam penelitian ini berupa data penerapan akuntansi aktiva tetap yang meliputi pengadaan aktiva tetap, pengeluaran setelah

masa perolehan, penyusutan aktiva tetap, penghentian dan pelepasan aktiva tetap.

- 4) Studi Pustaka merupakan pengumpulan data yang bersifat teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penerapan akuntansi aktiva tetap yang meliputi pengadaan aktiva tetap, pengeluaran setelah masa perolehan, penyusutan aktiva tetap, penghentian dan pelepasan aktiva tetap.

3. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis deskriptif komparatif yang dimaksudkan adalah membandingkan pengelolaan aktiva tetap menurut Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau dengan PSAK No. 16 Tahun 2017.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlakuan akuntansi aktiva tetap pada suatu perusahaan perlu untuk diketahui atau disesuaikan dengan standar yang berlaku umum, perihal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 Tentang Perlakuan Aktiva Tetap, tak terkecuali dengan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau

Berikut perbandingan perlakuan akuntansi aktiva tetap menurut Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau dan menurut PSAK No. 16

1) Pengadaan aktiva tetap

Pengadaan aktiva tetap pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau dilakukan dengan cara pembelian tunai dan membuat sendiri. Dalam proses pengadaan aktiva tetap, KSP Sejahtera mengkapitalisasikan harga dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap dipakai seperti semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva dan pengeluaran-pengeluaran lain hingga aktiva siap untuk dipakai berdasarkan bukti transaksi dan dokumen-dokumen terkait. Sedangkan menurut PSAK NO.16 tahun 2017 dalam menentukan harga perolehan dicatat sebesar biaya yang tertera pada faktur pembelian bea impor, pajak pembelian dan biaya lain-lain yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Dalam proses pengadaan aktiva tetap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan karena pada pencatatannya perusahaan sudah mengkapitalisasikan harga dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap dipakai seperti biaya-biaya lainnya kedalam harga perolehan aset tetap dan mencatatnya sebesar harga beli dan biaya lain-lain.

2) Pengeluaran setelah peolehan aktiva tetap

Dalam mencatat pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada aset tetap, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau, memiliki kebijakan tersendiri. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi harus ditentukan pengaruh dan manfaatnya terhadap aset yang bersangkutan. Apakah memberikan manfaat ekonomis lama, baik itu dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi dan sebagainya, apakah pengeluaran tersebut material atau tidak. Hal ini dilakukan untuk memisahkan cara pembebanan dari pengeluaran tersebut, apakah akan dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Beban pemeliharaan dan perbaikan tersebut dimasukkan perusahaan dalam beban lapran laba rugi. Yang berarti koperasi telah membebankan pengeluaran-pengeluaran tersebut pada beban tahun berjalan, bukan mengkapitalisasikan pengeluaran tersebut keharga perolehan. Perlakuan kebijakan akuntansi aktiva tetap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 tahun 2017

yang menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan aset yaitu biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk didalamnya suku cadang kecil. Pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut biaya pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap, sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan.

3) Penyusutan Aktiva Tetap

Dalam menentukan besarnya beban penyusutan aktiva tetap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau menggunakan metode garis lurus yaitu harga perolehan dibagi dengan masa manfaat sehingga besarnya beban penyusutan tiap tahun adalah sama, secara periodik beban ini dikelompokkan segai biaya tetap yang tidak dapat dipengaruhi selama masa manfaat. Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tahun 2017 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Serta ada berbagai metode penyusutan dapat digunakan. Dalam mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya, bisa dengan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit, jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya (baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan.

Dengan demikian perlakuan penyusutan aktiva tetap yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 tahun 2017 karena tidak menentukan nilai residu dari setiap aktiva tetap.

4) Penghentian dan Pelepasan Aktiva Tetap

Penghentian pengakuan aktiva tetap pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau terjadi apabila aktiva tetap sudah rusak atau sudah tidak digunakan lagi atau aktiva tetap sudah habis masa manfaatnya. Dalam melakukan penghentian penyusutan aktiva tetap yang telah selasi umur ekonomis/masa manfaatnya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau melakukan pencatatan/ jurnal untuk penghapusan dengan mendebetkan akun akumulasi depresiasi aktiva tetap dan mengkreditkan aktiva tetap yang telah habis umur ekonomisnya.

Perlakuan akuntansi penghentian aset tetap yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 mengatakan bahwa jumlah tercatat aktiva tetap dihentikan pengakuannya padasaat dilepas atau ketika tidak terdapa tlagi manfaat ekonomi dimasa depan yang diharapkan dari penggunaan. Hal yang ironis berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau terkait pencatatan penghentian penyusutan aktiva tetap tidak dilaksanakan sesuai dengan perlakuan akuntansi umum, hal ini berdasarkan fenomena yang dijumpai bahwa masih ada bangunan kantor yang pada tahun 1993 telah habis masa manfaatnya dan telah dihentikan penyusutannya tetapi masih terus digunakan sampai sekarang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

Perlakuan akuntansi aktiva tetap yang dilakukan/diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau adalah merupakan kebijakan perusahaan. Dalam perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap mulai dari pengadaan aktiva tetap, pengeluaran setelah perolehan aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, serta penghentian dan pelepasan aktiva tetap, hanya penyusutan aktiva tetap yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 tentang perlakuan akuntansi aktiva tetap, karena Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau tidak menentukan nilai residu dari aktiva-aktiva yang dimilikinya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan ,maka saran-saran dari penulis sebagai berikut :

- 1) Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau perlu menentukan nilai reidu dari setiap aktiva yang dimilikinya sehingga dalam perlakuan penyusutan aktiva tetap dapat memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum (PSAK).
- 2) Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau harus konsisten dengan kebijakan yang diambil terkait status aktiva tetap yang sudah habis masa manfaatnya baik yang sudah rusak atau yang masih dapat digunakan.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baubau perlu menentukan dan memisahkan status aktiva tetap yang sudah habis masa manfaatnya baik yang sudah rusak atau yang masih dapat digunakan sehingga catatan atas aktiva tetap produktif tidak menjadi tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Rusdi. 2004. *Akuntansi pengantar*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Al. Haryono Jusup. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi I*. Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Amir Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Bernhard Limbong. 2012. *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Cetakan kedua. Margaretha Pustaka. Jakarta
- Donald. 2009. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva tetap* . Pada PT. Hasjrat Multifinance Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi. Manado
- Erni Susanti. 2010. *Evaluasi Pengelolaan Aktiva tetap Pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Giri Efraim Ferdinan. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN
- Hermika. 2010. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva tetap terhadap Aktiva Tetap Berwujud*. Pada PT.Pandu Siwi Soetoso Palembang. PSAK No.16 Tahun 1994. Konvergensi IFRS. Skripsi Universitas Gunadarma Depok

- Harry Febri. 2009. *Analisis Pelaksanaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2008*. Skripsi Universitas Andalas. Padang
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Revisi 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas. Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Jakarta. Salemba Empat
- James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersu Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, dan Chaerul D. Djakman. 2010. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Jochen, Ropke. 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta
- M. Yusuf. 2010. *Langkah Pengelolaan Asset*. Salemba Empat. Jakarta
- Salainti. 2013. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap*. Pada PT.PLN (persero) Wilayah Sulutenggo Area Manado. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sofyan syafri, Harahap. 2002. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Edisi Pertama Penerbit PT.Raja Grafindo. Jakarta
- Sugiri Slamet. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar 2*. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN. Jogjakarta
- Soemarso S.R. 2005. *Akuntansi suatu pengantar*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* Alfabeta. Bandung.
- Stice, E kay, James D stice, Skousen et. al. 2005. *Akuntansi Intermediate*. Salemba Empat. Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Wiwin Kriswati. 2013. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada PT. Jamsostek Cabang Bandung*. Skripsi. Fakultas ekonomi. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati. Bandung

EVALUASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAREAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU

Atik Suryati

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau

Rafiuddin

Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau

A B S T R A C K

Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 19 of 2016 concerning the Guidelines for the Management of Regional Property, is expected by the regional government to immediately compile and implement an administration system for bookkeeping, inventorying and reporting of the regional owned system by producing regional balance sheets and budget realization reports, and becoming the basis for the Secretariat Baubau City area. The objective to be achieved in this study is to determine the forerunner of the management of Regional Property at the Baubau City Regional Secretariat, whether it is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016. The results of the study reveal that the management of Regional Property at the Baubau City Regional Secretariat has not been well implemented. This includes aspects of administration that are constrained in the inventory process that is not good because there is still information about goods that are not yet complete. And also in the Regional Property valuation process, where the researcher cannot say whether or not in this process because the assessment process should be carried out by BPKAD, and the task of the Regional Secretariat is only to submit the process to BPKAD. In addition, the entire process of implementing Regional Property management has been carried out well. And furthermore, in carrying out the process of managing Regional Owned Property, it is still guided by the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 and users of goods still maintain government procedures from planning to reporting.

Keywords: Baubau City Regional Secretariat, Regional Property Management, Permendagri Number 19 Year 2016.

Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Baubau

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik negara/daerah yang terjadi disejumlah daerah khususnya di Kota Baubau perlu dikelola secara optimal karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan barang milik negara/daerah saat ini. Dikarenakan penggunaan peraturan pemerintah yang menjadi dasar dalam pengelolaan barang milik negara/daerah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah masih memiliki banyak kekurangan.

Dasar hukum pemerintah yang mengatur pengelolaan barang milik daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan barang milik daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem penatausahaan untuk pembukuan, inventarisasi dan melaporkan sistem milik daerah dengan menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran. Untuk menerapkan sistem yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diperlukan pengawasan dan kerjasama yang mampu melaksanakan proses pencatatan aset ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pengelola barang milik daerah secara teliti dan kompeten, termasuk pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Baubau.

Kondisi faktual yang terjadi di Kota Baubau saat ini, banyak pelaporan-pelaporan pengelolaan aset yang tidak dikelola dengan baik administrasinya, karena aset yang dikelola tidak memberikan data informasi yang tepat. Analisa kebutuhan barang milik daerah kurang baik serta tidak sebandingnya beban kerja yang diberikan kepada pengurus dan penyimpan barang juga merupakan penyebab kurang optimalnya pengelolaan barang milik daerah. Hal ini berakibat pada banyaknya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Belum tertibnya pengelolaan aset daerah diantaranya disebabkan karena pengelolaan aset belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) tentang petunjuk pengelolaan barang milik daerah. Disamping itu pula, realisasi belanja dan pemeliharaan barang tidak berdasar kepada rencana kebutuhan pembelian dan pemeliharaan barang. Hal lain yang menjadi alasan karena adanya pengklasifikasian barang, juga penyajian aset dan Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak informatif. Penyajian KIB yang belum informatif dan belum tertib mengakibatkan adanya aset hantu atau *ghost asset* yang dimana aset ini tidak diketahui keberadaan serta tidak jelas asal-usulnya. Termasuk pula aset peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2016, temuan tersebut antara lain aset tetap belum diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP 2010)), belum ada peraturan walikota tentang pengelolaan barang milik daerah (LHP 2009, LHP Manset 2015, LHP 2015), dan belum ada daftar BMD dan laporan BMD (LHP 2014), aset tetap masih ada yang bernilai Rp. 1,00 (LHP 2011, LHP Manset 2015).

Salah satu permasalahan dari temuan BPK RI adalah pada KIB yang disajikan tidak valid dan informatif, sehingga berakibat pada aset milik daerah tidak dapat dikuasai oleh daerah. Selain itu, tidak informatifnya KIB akan menyebabkan penyerobotan aset, aset tidak memiliki bukti kepemilikan yang lengkap sehingga berpotensi menyebabkan sengketa, serta lebih lanjut dapat menyebabkan tindak

korupsi oleh pihak bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian pustaka, spesifikasi aset belum disebutkan secara jelas, belum ada kode barang dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan belum didukung rincian. Selain itu, ditemukan pula aset tetap tanah yang belum didukung bukti kepemilikan, Tahun pengadaan, keterangan lokasi, dan keterangan luasan serta nilai tanah tersebut belum termasuk nilai tanah untuk jalan. Terdapat pula kendaraan bermotor yang dimiliki Pemerintah Kota Baubau belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan, dan masih banyak lagi temuan-temuan BPK RI mengenai aset tetap ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau, apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang termasuk baru di Indonesia, namun telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak kemunculannya, dan berbagai organisasi publik lainnya memandang akuntansi sektor publik sebagai sesuatu yang vital dalam aktivitasnya. Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Sektor publik eksis karena sangat dibutuhkan, jadi keberadaannya ditengah masyarakat tidak bisa dihindarkan. (Mahmudi, 2011).

Menurut Indra Bastian (2010:6), akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMND, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Baldrick (1998) dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi sektor publik memiliki karakteristik unik yaitu:

- a) Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan, sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
- b) Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.
- c) Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga negara membayar pajak kepada pemerintah, warga negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanan dari pemerintah.

2. Pemerintah Daerah

Dedi dan Hertianti (2011:55) seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara

urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selain itu didalam Pasal 1 Ayat (2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, mengartikan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011:271).

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP. PSAP disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yakni prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP bagi KSAP serta merupakan rujukan penting bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam PSAP.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Mursyidi, 2009:181).

5. Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, aset tak berwujud, aset bersejarah dan aset lainnya. Sejak ditetapkannya kewajiban

penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Aset tetap sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAP Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

6. Barang Milik Daerah

Yusuf (2010:13) menyatakan Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Dadang (2015, 117), Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan atau tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga.

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian dimana hal itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang perlu diuji kebenarannya, relevan dan lengkap dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak terkait untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.
- b. Penelitian Pustaka (*library research*), yakni teknik yang dilakukan melalui bahan bacaan dan sejumlah literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan

(Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999). Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan
- b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
- c. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horisonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan
- d. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari peneliti yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan
- e. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Didasarkan pada hasil analisis wawancara yang telah dilakukan, bahwa sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah yang diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Baubau telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah itu sendiri. Senada dengan apa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 18 ayat (1), “Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada”. Ketersediaan Barang Milik Daerah yang dimaksud adalah merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada pengelola barang atau pengguna barang. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan Barang Milik Daerah merupakan kebutuhan yang riil bagi Sekretariat Daerah dan merupakan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 juga telah ditetapkan tentang standarisasi perencanaan kebutuhan, dimana terdapat tiga (3) poin standarisasi yaitu standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Setelah dilakukan analisis pada hasil wawancara ditemukan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Baubau memiliki tiga standarisasi perencanaan kebutuhan, yaitu standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Berdasarkan hasil analisis wawancara, diperoleh bahwa pengadaan Barang Milik Daerah tidak terlepas dari perencanaan yang baik. Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Baubau, rupanya telah mengadaptasi dari apa yang telah diterangkan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dimana, terdapat dalam pasal 41 ayat (1), yang menerangkan bahwa, “pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel”.

Pernyataan diatas menerangkan bahwa sistem dan prosedur pengadaan Barang Milik Daerah yang diterapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Baubau yang sudah sesuai dengan perincian kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini tidak terlepas dari konsep perencanaan yang efektif. Proses pengadaan ini pun dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, menerangkan bahwa proses pengadaan yang dilaksanakan tidak terlepas dari pedoman Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

3. Penggunaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Penggunaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Baubau terbilang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa gubernur/bupati/walikota menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah (pasal 43 ayat (1)).

Penetapan status penggunaan barang milik daerah yang terlaksana pada Sekretariat Daerah Kota Baubau yaitu pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala daerah. pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang paling lambat akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Selanjutnya pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan penetaan status penggunaan barang milik daerah dari pengguna barang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan. Pernyataan ini sesuai dengan pokok pasal 48 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Baubau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum, serta pemanfaatan Barang Milik Daerah akan tetap dilakukan jika tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Daerah. hal ini telah seirama dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pun telah dijelaskan dalam pasal 78 ayat (2)dan (3).

Mekanisme pinjam pakai yang terlaksana pada Sekretariat Daerah Kota Baubau telah sesuai dengan pasal 159 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dimana disebutkan bahwa permohonan persetujuan pinjam pakai setidaknya memuat pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai, identitas peminjam pakai, tujuan penggunan objek pinjam pakai, rincian data objek pinjma pakai dibutuhkan dan jangka waktu pinjam pakai. Yang dimana hasil analisis wawancara dan pernyataan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 telah bersesuaian.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Mengenai pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah ini dilaksanakan baik secara administratif, fisik, maupun hukum. Hal ini bertujuan

untuk terhindar dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan dan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Hasil analisis wawancara ini setidaknya telah sama dengan apa yang tertera pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 299 ayat (2). Terkait dengan pemeliharaan Barang Milik Daerah, Sekretariat Daerah Kota Baubau mengambil langkah dengan melakukan pencatatan pemeliharaan ke dalam kartu pemeliharaan/perawatan dan membuat laporan pemeliharaan barang.

6. Penilaian Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Berdasarkan kepada hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa proses penilaian Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Baubau tidak menemukan jawaban yang pas. Hasil wawancara menyatakan bahwa pihak Sekretariat Daerah tidak dapat menilai langsung Barang Milik Daerah tertentu. Pihak sekretariat Daerah disini hanya akan mengajukan penilaian Barang Milik Daerah kepada BPKAD. Oleh karena itu, poin penilaian yang dimaksud tidak dapat dijelaskan secara aktual sesuai dengan kondisi yang terlaksana.

7. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Analisis wawancara selanjutnya, mengungkapkan bahwa mekanisme pemindahtanganan beraneka ragam. Dimulai dari penjualan, penjualan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah yaitu melalui lelang dan tanpa lelang. Penjualan tanpa lelang ini diperuntukkan kendaraan perorangan dinas dan Barang Milik Daerah lainnya seperti tanah dan/atau bangunan dan tanah kavling. Untuk mekanisme tukar-menukar dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah Daerah lainnya, BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, atau swasta dan pemerintah desa. Berbeda dengan hibah, hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non-komersial, dan penyelenggaraan pemerintah pusat/Daerah. pernyataan-pernyataan ini kiranya telah seperti apa yang telah di atur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

8. Pemusnahan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Pemusnahan barang milik daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau secara teori telah mengikuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Akan tetapi dari pelaksanaannya, proses pemusnahan barang milik daerah masih belum terlaksana dikarenakan tidak adanya kondisi barang yang mengharuskan barang tersebut untuk dimusnahka. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa proses pemusnahan barang milik daerah yang berada dalam kekuasaan Setda terlaksana sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

9. Penghapusan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Tidak jauh berbeda dengan proses pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah tidak dapat dinyatakan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dikarenakan proses penghapusan belum terlaksana dalam lingkup Setda Kota Baubau. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan.

10. Penatausahaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Proses penatausahaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau dilaksanakan dengan cara didaftarkan dan dicatat dalam penggolongan dan kodefikasi barang. Kodefikasi barang yang dimaksud seperti berupa KIB, KIR, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang. Pernyataan ini bersesuaian dengan pasal 474 ayat (1), “pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada dibawah pengusaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang”.

Selain itu, dalam pasal 476 ayat (1) menjelaskan bahwa pengguna barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Baubau. Hasil dari analisis wawancara menyatakan bahwa Sekretariat Daerah Kota Baubau membuat laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 tahunan

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Baubau

Berdasarkan analisis hasil wawancara, dijelaskan bahwa prosedur pembinaan yang terlaksana adalah pihak Sekretariat Daerah hanya menerima kebijakan yang diberikan oleh atasan. Atasan dalam hal ini adalah pihak kementerian yang menetapkan kebijakan terkait mengenai pembinaan Barang Milik Daerah. Sementara pihak Sekretariat Daerah hanya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerahnya saja.

PENUTUP

KESIMPULAN

Proses pengelolaan barang milik daerah pada sekretariat daerah Kota Baubau meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dimana masing-masing proses yang terlaksana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Dari masing-masing proses yang terlaksana, terdapat kendala yang menghambat proses pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di sekretariat daerah Kota Baubau. Sebut saja pada proses penatausahaan yang terkendala pada proses inventarisir yang kurang baik dikarenakan masih terdapat informasi mengenai barang yang belum sepenuhnya lengkap. Dan juga pada proses penilaian barang milik daerah, dimana peneliti tidak dapat mengatakan baik atau tidak pada proses ini dikarenakan proses penilaian yang seharusnya dilakukan oleh BPKAD Kota Baubau, dan tugas Sekretariat Daerah Kota Baubau hanya mengajukan prosesnya kepada BPKAD.

SARAN

Sekretariat daerah Kota Baubau, pada tahun anggaran 2018 dan selanjutnya, dalam menjalankan prosedur pengelolaan barang milik daerah, tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi VI*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Baldrick Siregar, 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP - STIEMKYKN. Yogyakarta.
- Baldrick Siregar dan Bonni Siregar, 1998. *Akuntansi Pemerintahan*. STIEMKYKN. Yogyakarta.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dadang Suwanda, 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Penerbit PPM. Jakarta Pusat.
- Dedi Nordiawan dan Hertianti Ayuningtyas, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Fakultas Ekonomi Unidayan. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2016*.
- Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE) Unidayan. Baubau.
- Indra Bastian 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Jamason Sinaga, 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf>. Diakses tanggal 16 Juni 2016.
- Kolinug M.S, Ilat V, Pinatik S. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*, Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 halaman 818-830.
- La Saeli, 2011. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Baubau*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Madmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____, 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- _____, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri, 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- ANALISIS BREAK EVEN POINT TERHADAP PENJUALAN JASA SEWA KAMAR PADA HOTEL CALISTA BEACH KOTA BAUBAU**

Apriyanti Murih Prasetyo
(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

ABSTRACT

The success or failure of a company can be seen from the ability of management to manage the company. The measurement that is often used to assess the success of management in a company is the profit earned by the company. Good planning can help in estimating the level of profits to be obtained by the company, so that the profits obtained will be more optimal. This research was conducted at the Hotel Calista Beach in Baubau City. This study aims to determine the number of minimum room rental services sales in 2015 that must be achieved in order to Break Even Point. The results of this study are expected to provide benefits for hotel management. The results of the Break Even Point analysis can be used by management as a minimum sales target in order to facilitate management as a material consideration for the progress of the Calista Beach Hotel Baubau. The type of data used is quantitative data and qualitative data as well as data sources used are primary data and secondary data. The analytical tool used is Break Even Point analysis. The results showed that the Break Even Point in 2015 was achieved when the sales volume reached Rp.1,017,351,016.00 for a year with the following details: (1) Suite room sales of Rp. 84,558,184.00. (2) Executive room sales of Rp. 177,572,187.00. (3) `Deluxe room sales of Rp. 372,221,811.00. (4) Superior room sales of Rp.382,998,834.00.

Key Word: Break Even Point Analysis

Analisis *Break Even Point* Terhadap Penjualan Jasa Sewa Kamar Pada Hotel Calista Beach Kota Baubau

PRNDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu pendukung perekonomian suatu negara. Melihat begitu strategisnya peran perusahaan bagi perkembangan perekonomian, maka perusahaan dituntut untuk berkembang agar dapat memiliki kemampuan melaksanakan manajemen yang terbuka dan rasional dalam mengelola organisasi serta usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Berhasil tidaknya suatu perusahaan bisa dilihat dari kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaannya. Ukuran yang sering kali dipakai untuk menilai keberhasilan manajemen dalam suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu manajemen seharusnya mampu membuat perencanaan yang baik bagi perusahaannya, agar perusahaan dapat memperoleh laba yang diinginkan.

Dalam membuat perencanaan laba antara biaya, volume penjualan, dan harga jual mempunyai peranan yang penting (Munawir, 2007:184). Untuk itu perlu digunakan analisis *Break Even Point*, karena analisis *Break Even Point* menyajikan informasi hubungan biaya, volume dan laba untuk perusahaan, sehingga memudahkannya dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian laba perusahaan dimasa yang akan datang. Analisis *Break Even Point* akan memberikan gambaran tentang batas penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian dan dapat memperoleh laba.

Setiap perusahaan perlu mengetahui tingkat *Break Even Point* perusahaan masing-masing, sama halnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti Hotel Calista Beach Kota Baubau. Hotel Calista Beach merupakan salah satu hotel yang cukup terkenal di kota Baubau memiliki daya tarik tersendiri bagi penulis untuk dijadikan sebagai objek dalam penulisan skripsi ini. Hotel Calista Beach memiliki lokasi yang sangat strategis, pemandangan pantai Kamali secara langsung dan dekat dengan pusat hiburan/wisata Baubau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah penjualan jasa sewa kamar minimum pada tahun 2015 yang harus dicapai agar *Break Even Point*. Penelitian ini diharapkan dapat berguna : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak manajemen hotel. Hasil analisis *Break Even Point* dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai target penjualan minimum agar memudahkan pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan pihak Hotel Calista Beach Baubau, Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca dan dapat menjadi dasar untuk mengadakan penelitian sejenis yang lebih baik.

TINJAUAN TEORI

1. Break Even Point

Analisis *Break Even Point* adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Oleh karena analisa tersebut mempelajari hubungan antara biaya - keuntungan - volume kegiatan, maka analisa tersebut sering pula disebut "*Cost – Profit – Volume analysis*" (C.P.V. analysis). Dalam perencanaan keuntungan, analisa break-even merupakan "*profit-planning approach*" yang mendasarkan pada hubungan antara biaya (*cost*) dan penghasilan penjualan (*revenue*) (Bambang Riyanto, 2000:359).

Analisis *Break Even Point* atau impas adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau dengan kata lain suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan (*revenue*) sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja (Mulyadi, 2001:35)

Analisis titik impas atau analisis pulang pokok atau dikenal dengan nama analisis *Break Even Point* merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas sering disebut analisis perencanaan laba (*profit planning*). Analisis ini biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan mengeluarkan suatu produk yang artinya dalam memproduksi sebuah produk tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen (Kasmir, 2012: 332).

2. Penjualan

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pengertian penjualan itu sendiri adalah sebagai berikut:

"Penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa (Henry Simamora, 2003:24)".

“Penjualan artinya penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasanya dilakukan secara teratur (Chairul Marom, 2002:28)”

Volume penjualan adalah pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk. Volume penjualan merupakan suatu yang menandakan naik turunnya penjualan dan dapat dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton atau liter (Freddy Rangkuti, 2009:207).

Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan penjualan barang. Semakin besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar kemungkinan laba yang akan dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu volume penjualan merupakan salah satu hal penting yang harus dievaluasi untuk kemungkinan perusahaan agar tidak rugi. Jadi volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan utama perusahaan dan bukannya untuk kepentingan volume penjualan itu sendiri. Terdapat beberapa indikator dari volume penjualan yang dikutip dari Kotler dan Armstrong (2004: 421) yaitu:

- Mencapai volume penjualan
- Mendapatkan laba
- Menunjang pertumbuhan perusahaan.

3. Harga Jual

Harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk jasa tersebut (Kotler dan Armstrong, 2004:439).

Keputusan penentuan harga jual adalah penentuan harga jual produk atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi (Kotler dan Armstrong, 2004:432).

Perusahaan dapat memilih satu di antara dua tujuan berorientasi laba dalam kebijaksanaan penetapan harga. Tujuan berorientasi laba dapat ditempuh dalam periode jangka pendek atau jangka panjang (Kotler dan Armstrong, 2004:433).

4. Perencanaan Laba

Laba adalah selisih dari pendapatan atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto, 2003:444).

Perencanaan memegang peranan penting dalam keberhasilan perusahaan menyangkut masa depan perusahaan guna menjaga kontinuitas usaha dan pencapaian tujuan perusahaan. Perencanaan laba perlu dilakukan agar dapat menghasilkan laba yang optimal untuk memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para pemegang saham manajemen, konsumen, karyawan, pemerintah (Kuswadi, 2005:135).

Perencanaan laba memiliki beberapa manfaat antara lain (Carter, 2009:7):

Perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Hal ini memungkinkan adanya peluang untuk menilai kembali setiap segi operasi dan memeriksa kembali kebijakan dan program.

Perencanaan laba menyediakan arahan ke semua tingkatan manajemen. Hal ini membantu mengembangkan kesadaran akan laba diseluruh lapisan organisasi dan mendorong kesadaran akan biaya serta efisiensi biaya.

Perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Hal ini menyediakan suatu cara untuk menyelaraskan usaha-usaha dalam mencapai cita-cita.

Perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Partisipasi dari semua tingkatan membantu mengeluarkan ide-ide dan menyediakan suatu cara untuk mengkomunikasikan tujuan serta memperoleh dukungan atas rencana akhir.

Anggaran menyediakan suatu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu. Hal ini mendorong manajer untuk merencanakan dan berkinerja secara efisien.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Hotel Calista Beach yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 25, Baubau, Sulawesi Tenggara.

- 1) Populasi dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan laba rugi dan biaya-biaya yang dikeluarkan sejak berdirinya Hotel Calista Beach Baubau pada tahun 2012 hingga sekarang.
- 2) Sampel dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan laba rugi dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun 2015.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti *Manager* dan *Accounting* pada Hotel Calista Beach Baubau.
- 2) Kerasipan yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas berupa laporan laba rugi, laporan jumlah tamu dan kamar yang dihuni.
- 3) Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dan mencatat gejala atau fenomena yang diteliti, yang terkait dengan analisis *Break Even Point* (BEP).

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Deskriptif, dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui hubungan analisis *cost volume profit* terhadap strategi perencanaan laba pada usaha Tahu Tempe Sabar Baubau.
- 2) *Break Even Point*, dengan menggunakan analisis *break even point* (BEP) untuk mendapat suatu keadaan dimana perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian baik dalam jumlah produk (unit) maupun dalam rupiah. Menurut Mulyadi (2001:42), rumus yang dapat di gunakan sebagai berikut:

$$BEP_{(Rp)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Rasio Marjin Kontribusi}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hotel Calista Beach memiliki 36 kamar yang terbagi dalam empat jenis kamar yang berbeda, yaitu 3 kamar *Suite*, 5 kamar *Executive*, 20 kamar *Deluxe*, dan 8 kamar *Superior*. Tarif sewa untuk masing-masing jenis kamar berbeda satu sama lain. Hotel Calista Beach menjual lebih dari satu macam jenis kamar maka analisis *Break Even Point* dihitung berdasarkan komposisi penjualan (*sales mix*) dan komposisi jumlah kamar yang dijual (*product mix*).

Setelah didapat hasil perhitungan *Break Even Point* secara total dalam rupiah, maka dapat dihitung besarnya penjualan untuk masing-masing jenis kamar dengan menggunakan komposisi penjualan (*sales mix*) dan komposisi jumlah kamar yang dijual (*product mix*).

Sales mix digunakan untuk mencapai *Break Even Point* (dalam rupiah) untuk masing-masing jenis kamar, sedangkan *product mix* digunakan untuk mencari penjualan individual (dalam unit). Masalah *sales mix* menjadi lebih penting untuk mengetahui jenis sewa kamar mana yang perlu didorong untuk memperoleh profit yang lebih tinggi, sebab hal ini membawa akibat pula terhadap *Break Even Point* (Alwi Syafaruddin, 1982:139).

Oleh karena itu analisis *Break Even Point* terhadap Hotel Calista Beach dihitung berdasarkan komposisi penjualan (*sales mix*) dan komposisi jumlah kamar yang dijual (*product mix*). Analisis ini adalah untuk menghitung *Break Even Point* pada periode tahun 2015.

1. Biaya-biaya Operasional

Biaya operasional merupakan semua biaya yang dikeluarkan oleh Hotel Calista Beach dalam melakukan kegiatan penjualan jasa, biaya-biaya tersebut terbagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Adapun rincian biaya operasional yang terjadiditampilkan pada tabel berikut:

Tabel, Biaya Operasional Hotel Calista Beach Baubau Tahun 2015

No.	Jenis Biaya	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya gaji tetap	412.800.000		412.800.000
3	Biaya TV kabel	15.120.000		15.120.000
4	Biaya wifi	43.200.000		43.200.000
5	Biaya Penyusutan Gedung	150.000.000		150.000.000
6	Biaya Penyusutan Kendaraan	21.400.000		21.400.000
7	Biaya Penyusutan Peralatan	94.360.000		94.360.000
8	Biaya Penyusutan Mesin	26.000.000		26.000.000

9	Biaya perawatan & pemeliharaan	5.800.000	5.800.000
10	Biaya listrik	24.515.000	24.515.000
11	Biaya telepon	10.555.500	10.555.500
12	Biaya air	19.481.000	19.481.000
13	Biaya breakfast	216.195.000	216.195.000
14	Biaya peralatan tulis	4.200.000	4.200.000
15	Biaya perlengkapan	3.200.000	3.200.000
16	Biaya transportasi	2.450.000	2.450.000
17	Biaya rooms	274.625.000	274.625.000
18	Biaya promosi	2.500.000	2.500.000
19	Biaya pelayanan/service charge	48.000.000	48.000.000
20	Biaya bahan bakar (solar)	2.400.000	2.400.000
Jumlah		762.880.000	613.921.500
		1.376.801.500	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 6.1 tersebut dapat diketahui bahwa biaya *rooms* merupakan biaya terbesar yang harus dikeluarkan, total biaya operasional tahun 2015 sebesar Rp 1.922.276.500.

Perhitungan biaya penyusutan yang terjadi pada masing-masing aktiva tetap yang dimiliki oleh Hotel Calista Beach Baubau dengan metode garis lurus ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2. Biaya Penyusutan Hotel Calista Beach Baubau.

No.	Biaya Penyusutan	Harga Perolehan (Rp)	Umur Ekonomis (Tahun)	Penyusutan per tahun(Rp)
1	Penyusutan Gedung	4.500.000.000	30	150.000.000
2	Penyusutan Motor	14.000.000	10	1.400.000
3	Penyusutan Mobil	200.000.000	10	20.000.000
4	Penyusutan Interior	900.000.000	10	90.000.000
5	Penyusutan Kulkas	4.800.000	5	960.000
6	Penyusutan Frizer	4.000.000	5	800.000
7	Penyusutan Televisi	3.000.000	5	600.000
8	Penyusutan AC	5.000.000	5	1.000.000
9	Penyusutan Komputer	5.000.000	5	1.000.000
10	Penyusutan Mesin generator	650.000.000	25	26.000.000
Jumlah Penyusutan per Tahun				291.760.000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 6.2 dapat diketahui bahwa total biaya penyusutan per tahun sebesar Rp. 291,760,000. Biaya penyusutan gedung sebesar Rp.150,000,000, biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp. 21,400,000 , biaya penyusutan peralatan sebesar Rp 94,360,000 dan biaya penyusutan mesin sebesar Rp. 26,000,000.

2. Volume Penjualan

Hotel Calista Beach Baubau merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang menjual jasa sewa kamar dengan 4 jenis kamar yang berbeda. Volume penjualan Hotel Calista Beach Baubau ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.4. Volume Penjualan Hotel Calista Beach Baubau Tahun 2015

No.	Jenis Kamar	Realitas jumlah kamar yang terjual (unit)	Harga sewa per kamar (Rp)	Penjualan
1	<i>Suite</i>	340	600.000	204.000.000
2	<i>Executive</i>	952	450.000	428.400.000
3	<i>Deluxe</i>	2.245	400.000	898.000.000
4	<i>Superior</i>	2.640	350.000	924.000.000
Jumlah		6.177		2.454.400.000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

Berdasarkan tabel 6.4 di atas dapat dilihat bahwa total penjualan tahun 2015 sebesar Rp 2.454.400.000.

3. Analisis *Break Even Point*

Break even point adalah titik yang menunjukkan kombinasi tingkat volume penjualan dan harga jual perusahaan, yang tidak mendapatkan laba ataupun merugi. Formulasi titik impas bermanfaat dalam memproyeksi penjualan yang harus dicapai untuk masing-masing produk dalam upaya menghindari kerugian. Analisis BEP pada penjualan jasa sewa kamar digunakan untuk mengetahui minimal penjualan yang harus diterima dari Hotel Calista Beach Baubau agar berada dalam posisi impas.

a. Perhitungan *Break Even Point* dalam Rupiah tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{BEP}_{\text{SELURUH}} &= \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Rasio Marjin Kontribusi}} \\ &= \frac{\text{Rp } 762.880.000}{74,99 \%} \\ &= \text{Rp } 1.017.351.016\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{BEP}_{\text{Suite}} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Penjualan}} \times \text{BEP}_{\text{SELURUH}} \\ &= \frac{\text{Rp } 204.000.000}{\text{Rp } 2.454.400.000} \times \text{Rp } 1.017.351.016 \\ &= \text{Rp } 84.558.184\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{BEP}_{\text{Executive}} &= \frac{\text{Rp } 428.400.000}{\text{Rp } 2.454.400.000} \times \text{Rp } 1.017.351.016 \\ &= \text{Rp } 177.572.187\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{BEP}_{\text{Deluxe}} &= \frac{\text{Rp } 898.000.000}{\text{Rp } 2.454.400.000} \times \text{Rp } 1.017.351.016 \\ &= \text{Rp } 372.221.811\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{BEP}_{\text{Superior}} &= \frac{\text{Rp } 924.000.000}{\text{Rp } 2.454.400.000} \times \text{Rp } 1.017.351.016 \\ &= \text{Rp } 382.998.834.\end{aligned}$$

Hasil perhitungan BEP tersebut menunjukkan bahwa agar berada dalam posisi *Break Even Point* maka jumlah yang harus terjual untuk jenis kamar *Suite* adalah sebesar Rp 84.558.184, untuk jenis kamar *Executive* adalah sebesar Rp.177.572.187, untuk jenis kamar *Deluxe* adalah sebesar Rp 372.221.811, dan untuk jenis kamar *Superior* adalah sebesar Rp 382.998.834 atau total sebesar Rp.1.017.351.016.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan *Break Even Point* tahun 2015 yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa *Break Even Point* tahun 2015 diraih saat volume penjualan mencapai Rp.1.017.351.016,00 selama setahun

dengan perincian sebagai berikut:

1. Penjualan kamar *Suite* sebesar Rp. 84.558.184.
2. Penjualan kamar *Executive* sebesar Rp. 177.572.187.
3. Penjualan kamar *Deluxe* sebesar Rp. 372.221.811.
4. Penjualan kamar *Superior* sebesar Rp. 382.998.834.

2. Saran

Berdasarkan perhitungan analisis *Break Even Point* yang telah dilakukan, penulis menyarankan kepada pihak manajemen Hotel Calista Beach Bauabu untuk meningkatkan jumlah penjualan dapat dilakukan dengan menaikkan laba. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan (*service*) kepada tamu.
- b. Memberikan *discount* pada para pelanggan.
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, seperti instansi pariwisata untuk menjadi penyedia kamar hunian pada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pariwisata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*. BPFE. Yogyakarta.
- Alwi Syafaruddin. 1982. *Alat-alat Analisa Dalam Pembelian*. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta.
- Bambang Riyanto. 2000. *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta.
- Carter, William K. 2009. *Akuntansi Biaya*. Edisi 14. Dialihbahasakan oleh Krista. Salemba Empat. Jakarta.
- Damayanti P Selvina. 2005. *Analisa Break Even Point Terhadap Penjualan Jasa Sewa Kamar Pada Hotel Surya Indah Salatiga*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Fariz Gilang Mifta. 2013. *Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) Sebagai Alat Bantu Evaluasi Pencapaian Laba Pada Hotel Grasia Semarang*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Freddy Ranguti. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Edisi 2003/2004. BPFE. Yogyakarta.
- Henry Simamora. 2003. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Edisi II. UPP AMP YKPN. Yogyakarta..
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kotler dan Armstrong. 2004. *Prinsip-Prinsip Marketing*. Edisi Ketujuh. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuswandi. 2005. *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Lukman Syamsuddin. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marom Chairul. 2002. *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Edisi 2. Grasindo. Jakarta.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Salemba Empat. Jakarta.

- . 2012. *Akuntansi Biaya*. Edisi 5. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Munandar M. 2010. *Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.
- Munawir S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Liberty. Yogyakarta.
- Nelly Wiharjo. 2011. *Analisis Hubungan Cost-Volume-Profit (CVP) untuk Perencanaan Laba pada Hotel Losari Beach*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Soehardi Sigit. 2002. *Analisa Break Even Ancangan Linear Secara Ringkas dan Pasti*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.

**ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU**

Siti Mustika Masagu

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

Rosnani Said S.E., M.Si

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

The commitment of the Government of Indonesia to carry out reforms in the field of accounting, especially for the implementation of accrual-based accounting in every government agency, both the Central Government and Local Governments, but towards the end of 2010 published Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards in lieu of Government Regulation Number 24 Year 2005 The implementation of accrual-based accounting is a continuous and integrated process. This research includes quantitative research with multiple linear analysis with data collection methods with interviews and questionnaires. The results showed that based on the calculation of the correlation coefficient (R) of 0.167 showed a very low relationship between the readiness of human resources, information technology and the application of accrual accounting at the Regional Revenue Service of Baubau City. Hypothesis test results using the F-test, the calculation results obtained f-value of $0.389 < f\text{-table } 3.354$ can be concluded that the independent variables (readiness of human resources and information technology) simultaneously have no effect on the application of accrual accounting. Then through the t-test, for the variable readiness of human resources known $t\text{-count} < t\text{-table } (0.324 < 2.0518)$ shows that the variable of human resource readiness partially has no significant effect on the application of accrual accounting. For the information technology readiness variable, $t\text{-count} < t\text{-table } (-0.811 < 2.0518)$ indicates that the information technology readiness variable partially has no significant effect on the accrual accounting application.

Key Word: Accrual accounting readiness, human resources, and information technology.

**Analisis Kesiapan Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Baubau**

PENDAHULUAN

Reformasi bidang akuntansi yang terjadi di Indonesia dilakukan secara bertahap mengingat bahwa masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam penerapan peraturan. Oleh karena itu, agar dapat memberikan kemajuan dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menetapkan penggunaan basis kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual (CTA)* sebagai metode penyusunan laporan keuangan pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban keuangan mereka. Basis kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual (CTA)* ini dimaksudkan sebagai basis kas yang dimodifikasi dengan beberapa sistem pencatatan akrual yang merupakan tahap awal dari

pengadopsian basis akrual di Indonesia. *West and Carnegie* (2005) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi sektor publik ke basis akrual dimotivasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas yang tinggi dalam institusi sektor publik.

Namun menjelang akhir tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, merupakan regulasi pemerintah yang mengatur penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni selama masa transisi, dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.

Sebagai daerah otonom, Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan diminta pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Manajemen keuangan di daerah harus dikelola secara ekonomi, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel. Perpaduan pengawasan terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yaitu antara masyarakat daerah dan Pemerintah Pusatlah yang melahirkan sistem pengawasan yang baik, benar dan bermutu (Halim, 2007:9).

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Keberhasilan atau kegagalan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi Pemerintah Daerah. Apabila dalam sebuah instansi pemerintahan memiliki sumber daya manusia yang handal serta didukung oleh teknologi informasi itu mampu menjadi modal awal dalam menunjang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini akan mengacu pada tiga penelitian terdahulu yaitu Ni Made Ari Widyastuti (2015) yang meneliti pada Pemerintah Kabupaten Gianyar, Muhammad Man Azwan (2015) yang meneliti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Gabriella (2013) yang meneliti pada Pemerintah Provinsi DIY.

Hasil penelitian dari Ni Made bahwa kesiapan dari SDM pemerintah Kabupaten Gianyar belum siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual, kesiapan dari SIA menunjukan bahwa sudah ada sistem khusus yang bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan dalam pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gianyar. Man Azwan bahwa sumber daya manusia adalah dalam kategori siap dan untuk Ketersediaan Sistem Informasi adalah dalam kategori siap. Sedangkan Gabriella bahwa variabel SDM secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kesiapan penerapan akuntansi akrual pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Mardiasmo (2009:148) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Mahsun *et al.*, (2013) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP dengan mengacu pada praktek-praktek terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat/daerah, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksudkan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki dua basis penerapan yaitu :

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas,

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 berbunyi, “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”.

3. Akuntansi Akrual

Mardiasmo (2009; 154-155) Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan cost of services dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau menjadi (incurred), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

4. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai historis (Historical cost), realisasi (Realization), substansi mengungguli bentuk formal (Substance Over Form), periodisitas (Periodicity), konsistensi (Consistency), pengungkapan lengkap (Full Disclosure) dan penyajian wajar.

5. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional (LO).

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

6. Nilai Historis (Historical cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat di verifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

7. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah di otorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana di praktekkan dalam akuntansi komersial.

8. Substansi mengungguli bentuk formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

10. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama di terapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang di butuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat di tempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

12. Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

13. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, pembiayaan, pendapatan-Laporan Operasional (LO), dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

14. Pengakuan aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

15. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

16. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

17. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau, JL. Dayanu Ikhsanuddin No.59, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Subtansi Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran.
2. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian, dalam hal ini adalah Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau.
3. Studi Pustaka adalah pengumpulan data sekunder yang bersumber dari literatur, internet, atau hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibedakan untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisis secara deskriptif setiap data atau tanggapan responden berdasarkan kuesioner yang diajukan. Sedangkan analisis data kuantitatif yang berupa angka-angka (skor) dari jawaban responden dari hasil pengukuran melalui kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert dengan lima komponen. Data yang diperoleh diolah dalam komputer dengan menggunakan program SPSS Versi 21.

Pengukuran diorientasikan pada beberapa aspek yaitu mengukur sumber daya manusia, teknologi informasi, dan penerapan akuntansi akrual pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau.

Setelah data terkumpul melalui kuesioner, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Langkah persiapan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner serta memeriksa kebenaran persepsinya.
- b. Melakukan tabulasi hasil kuesioner dan memberikan nilai sesuai skor yang telah ditetapkan. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan menggunakan skala ordinal.
- c. Dalam hal tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai tujuan penelitian. Dalam menganalisis pengaruh digunakan analisis regresi. Untuk keperluan analisis regresi ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Memberikan peringkat dengan lima alternatif jawaban 1, 2, 3, 4 dan 5 dimana pilihan jawaban responden adalah skor dari setiap item.
 - 2) Teknik analisis regresi memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval, maka pengukuran perlu ditingkatkan menjadi interval dengan method of successive interval (MSI), seperti yang dikemukakan oleh Al Rasyid dalam Syahrirman Yusi dan Umiyati Idris (2009:84) dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
 - a) Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebarkan.
 - b) Pada setiap butir ditentukan berapa yang mendapat skor 1, 2, 3, 4 dan 5 yang disebut sebagai frekuensi.
 - c) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
 - d) Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.
 - e) Gunakan tabel distribusi normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi yang diperoleh.
 - f) Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z, yang diperoleh dengan menggunakan tabel tinggi densitas.
 - g) Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus :
$$SN = \frac{(\text{Densitas pada batas bawah terendah}) - (\text{densitas pada batas tertinggi})}{(\text{Area di bawah batas tertinggi}) - (\text{area di bawah terendah})}$$
 - h) Tentukan nilai transformasi dengan rumus :
$$Y = NS + (1 + (SN_{\min}))$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,167 menunjukkan hubungan yang sangat rendah antara kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi dan penerapan akuntansi akrual pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau. Koefisien determinasi (R Square) R^2 sebesar 0,028 menunjukkan bahwa sebesar 2,8% penerapan akuntansi akrual dipengaruhi oleh variabel kesiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pemahaman mengenai akuntansi akrual secara teori sebagian pegawai mengerti namun dalam pelaksanaannya masih sulit karena merasa terbebani dengan adanya penambahan laporan seperti laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas (Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ningsih bendahara pengeluaran pada Dinas pendapatan Daerah Kota Baubau).

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji-F, dari hasil perhitungan diperoleh nilai f-hitung $0,389 < f\text{-tabel } 3,354$ dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen (kesiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi) secara serentak tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Kemudian

melalui uji-t, untuk variabel kesiapan sumber daya manusia diketahui nilai t-hitung variabel kesiapan sumber daya manusia adalah sebesar 0,324, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,0518, sehingga $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,324 < 2,0518$) menunjukkan bahwa variabel kesiapan sumber daya manusia secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini di dukung dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Asni Kepala Bagian Substansi Keuangan pada Dinas pendapatan Daerah Kota Baubau, terutama sumber daya manusia untuk bagian akuntansi masih sedikit sehingga proses pembuatan laporan sedikit terhambat dan secara nyata hingga saat ini hanya mengikuti sosialisasi atau pelatihan dengan pertemuan satu atau dua kali saja (lihat lampiran 13). Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ari Widyastuti (2015) dari hasil penelitian menunjukkan kesiapan dari sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Gianyar tidak siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual. Untuk variabel kesiapan teknologi informasi, diketahui nilai t-hitung variabel kesiapan teknologi informasi adalah sebesar -0,811, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,0518, sehingga $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($-0,811 < 2,0518$) menunjukkan bahwa variabel kesiapan teknologi informasi secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini di dukung dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Asni Kepala Bagian Substansi Keuangan pada Dinas pendapatan Daerah Kota Baubau bahwa dari segi teknologi informasi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau tetap mengikuti perkembangan zaman namun untuk akuntansi akrual masih belum menggunakan aplikasi khusus di karenakan penerapan akuntansi akrual yang masih baru. Hal ini juga di dukung oleh penelitian Gabriella (2014) Teknologi informasi tidak mempengaruhi terhadap Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual. Jika dilihat pada t-hitung yang berada pada nilai $(0,455) > t\text{-tabel}$ (1.65978) dan nilai probabilitas signifikan $(0,650) > 0,1$. Kemampuan meningkatnya Teknologi Informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DIY tidak akan berpengaruh apapun pada Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di dukung dengan hasil wawancara dimana kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menghasilkan keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. Namun kenyataan di lapangan bahwa penerapan akuntansi akrual untuk wilayah kota baubau mulai berlaku pada akhir bulan November 2015 bersamaan dengan pelatihan pegawai di Yogyakarta (lihat di lampiran 13), sebagai tahap baru penyusunan akrual pernyataan ini hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau yaitu Ningsih selaku Bendahara Pengeluaran, hal ini juga di akui oleh Kepala Substansi Keuangan yaitu Asni. Walaupun terlambat Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau telah mengikuti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 10 pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Mengenai peraturan daerah yang terkait dengan sistem prosedur dan kebijakan akuntansi dibuat pada tahun 2015 yaitu berupa panduan Peraturan

Walikota Baubau tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Baubau dan di pakai pada saat berlakunya akuntansi akrual di kota Baubau (lihat lampiran 13).

Sepatutnya menurut KSAP (2010), pada tahun 2010 telah diadakan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pada tahun 2011 penyiapan peraturan pelaksanaan, kebijakan akuntansi dan sistemnya sudah harus ada serta sosialisasi lanjutan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 dilakukan *capacity building* atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sosialisasi dan pelatihan serta dilakukan lanjutan pengembangan sistem kemudian pada tahun 2013 implementasi percobaan sistem di beberapa pemerintah daerah telah dilakukan. Pada tahun 2014 dilakukan implementasi paralel akuntansi akrual dan akuntansi kas menuju akrual untuk seluruh SKPKD hingga penerapan basis akrual penuh pada tahun 2015.

Namun realitanya tak seperti yang di harapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau tidak siap untuk menanggapi perubahan standar akuntansi pemerintahan ini. Idealisme yang diinginkan oleh perubahan standar akuntansi pemerintahan ini belum tercapai. Mindset para aparatur tersebut hanya terletak pada kendala yang kira-kira akan mereka lalui. Seperti jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Dari wacana-wacana yang diungkapkan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau melakukan persiapan-persiapan yang mengarah ke penerapan basis akrual dengan lebih intens melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada jajaran staf dan pejabat pemerintahan Kota Baubau serta penyesuaian peraturan lokal. Upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka sebagai bentuk formalitas dari Pemerintah Kota Baubau sendiri dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau terkesan hanya mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah apa yang berlaku saat ini maka peraturan tersebut yang akan diikuti oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau. Setiap ada perubahan peraturan wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrual.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. variabel kesiapan sumber daya manusia secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini dapat dilihat dari $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,324 < 2,0518$), kemampuan meningkatnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau tidak akan berpengaruh apapun pada Penerapan akuntansi akrual.
2. variabel kesiapan teknologi informasi secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini dapat dilihat dari $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($-0,811 < 2,0518$), kemampuan meningkatnya

teknologi informasi yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau tidak akan berpengaruh apapun pada Penerapan akuntansi akrual.

3. Kesiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau secara bersama – sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual. Hal ini dapat dilihat dari nilai f-hitung $0,389 < f\text{-tabel } 3,354$.
4. Peraturan daerah yang terkait dengan sistem prosedur dan kebijakan akuntansi dibuat pada tahun 2015 yaitu berupa panduan Peraturan Walikota Baubau tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Baubau dan di pakai pada saat berlakunya akuntansi akrual di kota Baubau.
5. Sumber daya manusia untuk bagian akuntansi masih sedikit sehingga proses pembuatan laporan sedikit terhambat dan secara nyata hingga saat ini hanya mengikuti sosialisasi atau pelatihan dengan pertemuan satu atau dua kali.
6. Kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan laporan keuangan masih belum ada perangkat lunak khusus.
7. Setiap ada perubahan peraturan wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrual.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dipeeroleh, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pada penempatan sumber daya manusia seharusnya pegawai yang berlatar belakang pendidikannya di bidang akuntansi serta menguasai teknologi informasi terutama dalam kompetensi disebabkan dari hasil data responden rata-rata tingkat pendidikan tamatan SMA dari segi usia produktif juga sudah tidak memungkinkan.
2. Seharusnya baik instansi atau pemerintah khususnya kota Baubau agar lebih obyektif serta merubah kebiasaan lama yang hanya membuat peraturan sebagai formalitas semata.
3. Pengembangan wawancara untuk mengupas indikator-indikator yang terdapat pada parameter kesiapan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjelaskan pengaruh dari masing-masing parameter terhadap penerapan akuntansi akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiyani, Sulani. 2009. *Faktor-Faktor Pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu*. Simposium Nasional XII. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota DKI Jakarta
- Efferin, Sujoko. 2008. *Mengungkapkan Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Etrin Damayanti. 2012. *Analisis Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007-2009*. Skripsi Akuntansi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- <http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Gabriella Ara Adventana. 2013. ***Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No.71 Tahun 2010***. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Halim A. 2007. ***Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi***. Salemba Empat. Jakarta
- Hariyanto, Agus. 2012. ***Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia***. STIE Dharma Putra , Semarang.
- Indriantoro, Nur. dan Supomo, Bambang. 2002. ***Metodologi Penelitian***. Jakarta: Indeks
- Indriasari, Desi. 2008. ***Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir)***. Simposium Nasional Akuntansi XI, Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- International Federation of Accountants, ***IFAC Handbook of International Public Sector of Accounting Standards Board***,<http://www.ifac.org>.
- Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 7 Pdf
- KSAP.2010. ***Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah***. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- M. Suyanto. 2005. ***Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis***. Andi Offset. Yogyakarta
- Mahsun *et al.* (2013) ***Akuntansi Sektor Publik, Edisi ketiga***. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. ***Akuntansi Sektor Publik***. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marguerite G. Lodico, Dean T. Spaulding, Katherine H. Voegtler. 2006. ***Methods in Educational Research: From Theory to Practice*** (San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.) p.211.
- Mohammad Man Azwan. 2015. ***Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Sebuah Analisis Deskriptif***. Skripsi Akuntansi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Nazier, Daeng. 2009. ***Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. Seminar Nasional***. www.bpk.go.id
- Ni Made Ari Widyastuti, Edy Sujana, I made Pradana Adiputra. 2015. ***Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar***. Jurnal Akuntansi Volume 3 No.1. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 ***Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah***.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 ***Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan***.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 ***Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan***.
- Peraturan Walikota Nomor... Tahun 2015 ***Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Baubau***
- Riris Setiawati Kusuma. 2013. ***Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam***

- menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.*** Skripsi. Universitas Jember.
- Syahrirman Yusi, Umiyati Idris.2009. ***Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif.*** Penerbit Citrabooks. Indonesia
- Sugiyono. 2010. ***Memahami Penelitian Kualitatif.*** Alfabeta. Bandung
- Uma Sekaran. 2011. ***Research Methods For Business.*** Salemba Empat. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang ***Keuangan Negara.***
- Veithzal Rivai. 2008. ***Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek.*** PT. RajaGrafindo. Jakarta.
- Wa Ode Nur Ainun. 2005. ***Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Suatu Survei Pada Kantor Pusat PT. Sarana Karya (PERSERO) di Kabupaten Buton).*** Tesis Universitas Padjajaran Bandung. Bandung
- Wayan Edi Suparman, Nyoman Trisna Herawati, Edy Sujana. 2014. ***Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.*** e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2)
- West, B.P., Carnegie, G.D. 2005. ***Making Accounting Accountable In The Public Sector.*** Critical Perspektive On Accounting, 16, 905-928.

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA CV. SINAR JAYA BUANA BAUBAU

Wa Ode yuni Sukmati

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan)

Fitrianti Da'a

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan)

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the application of accounting information systems on CV. Sinar Jaya Buana Baubau. The benefits of this research are to find out information about the company's financial condition accurately, faster and up to date, and can be used as a reference material in preparing financial statements.

This research was conducted at CV. Sinar Jaya Buana Baubau. The type of data used is qualitative and quantitative data, and the data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques used were field surveys and field studies, Based on the results of the study using descriptive analysis, it is known that the accounting system carried out by the company still uses a manual system. In preparing the profit / loss statement, the company does not include accumulated depreciation transactions. And must separate the assets owned by the company with the previous company in order to facilitate the preparation of the balance sheet. Thus it is known that the accounting information system applied by CV. Sinar Jaya Buana is still simple.

Key Work: Accounting Information Systems

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada CV. Sinar Jaya Buana Baubau

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan suatu alat penting untuk memberikan informasi mengenai data ekonomi dan keuangan sebuah perusahaan. Untuk memberikan informasi finansial perusahaan secara akurat dan mutakhir, didalam akuntansi diperlukan sistem pencatatan yang baik dan benar agar pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan selanjutnya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan, maka perusahaan harus menyusun suatu sistem akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak diluar maupun didalam perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu perusahaan dapat diproses dengan cara manual ataupun dengan menggunakan alat-alat canggih seperti komputer. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin penting informasi yang dibutuhkan perusahaan.

Dasaratha V. Rama dan Frederick L.Jones (2008:3), sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi, lalu informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi tersebut dilakukan entah dengan sistem manual atau melalui sistem yang terkomputerisasi.

Hubungan antara input, proses dan output adalah sebagai berikut:

Tahapan sistem informasi akuntansi

Sumber: Dasaratha V. Rama dan Frederick L.Jones (2008:4)

Gambar 1: Tahapan sistem informasi akuntansi

Sumber: Michell Suharni (2006:143)

Gambar 2: Siklus pengolahan data secara manual

Sumber: Michell Suharni (2006:148)

Gambar 3: Siklus pengolahan data yang terkomputerisasi

TINJAUAN TEORI

Siklus Transaksi Sistem Informasi Akuntansi

Romney Steinbert (2005:121), Sistem Informasi Akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan. Empat macam pemrosesan siklus akuntansi yaitu:

1. Siklus pendapatan (*Revenue Cycle*)

Siklus pendapatan (*revenue cycle*) adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut.

a. Pada siklus pendapatan, terdapat 4 aktifitas dasar bisnis yaitu :

- Memasukkan pesanan penjualan (*sales order entry*)
Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari para pelanggan.
- Mengirim pesanan (*shipping*)
Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut.
- Penagihan dan piutang usaha (*billing and accounts receivable*)
Aktivitas dasar ketiga dalam siklus akuntansi pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha.
- Menerima pembayaran/kas (*cash collection*)
Langkah terakhir dari siklus pendapatan adalah menerima pembayaran. Yang melakukan aktivitas ini adalah kasir.

b. Batasan Aplikasi siklus pendapatan

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu).

Beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis adalah:

- Definitif: Suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan yang jelas.
- Urutan: Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang.
- Pelanggan Suatu proses bisnis harus mempunyai penerimaan hasil proses.
- Nilai tambah: Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
- Keterkaitan: Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
 - Fungsi silang: Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

c. Subsistem / Komponen

siklus pendapatan sebenarnya terdiri atas dua subsistem utama, yaitu:

- Subsistem prosesnya pesanan penjualan
- Subsistem penerimaan kas

Romney Steinbert (2005:167) Siklus pengeluaran (*expenditure cycle*) adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa.

a. Pada siklus pengeluaran, terdapat 3 aktivitas dasar bisnis yaitu :

- Memesan barang , persediaan, dan jasa
aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan.

- Menerima dan menyimpan barang, persediaan, dan jasa.
Aktivitas kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan.
- Membayar untuk barang, persediaan, dan jasa.
Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran.

b. Batasan aplikasi siklus pengeluaran

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan.

Beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis adalah:

- Definitif: Suatu proses bisnis harus memiliki batasan, keluaran yang jelas.
- Urutan: Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang.
- Pelanggan: Suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses.
- Nilai tambah: Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
- Keterkaitan: Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
- Fungsi silang: Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

c. Subsistem siklus pengeluaran

Subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran, laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai :

- Setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian.
- Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima.
- Membayar barang.

2. Siklus produksi.

Siklus ini mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi. Siklus produksi ini tidak termasuk harga pokok penjualan.

a. Pada siklus produksi, terdapat 4 aktivitas dasar bisnis yaitu :

- Perancangan Produk
- Perencanaan dan Penjadwalan
- Operasi Produksi
- Akuntansi Biaya

b. Batasan aplikasi siklus produksi

Pengendalian persediaan dapat dicapai melalui catatan-catatan dan laporan-laporan persediaan yang menyajikan informasi seperti penggunaan persediaan, saldo persediaan, tingkat minimal dan maksimal persediaan.

c. Subsistem aplikasi siklus produksi

Perancangan produk merupakan tahap awal dari sistem produksi yang bertujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi yang rendah guna untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Tahap akhir dalam sistem produksi adalah sistem akuntansi biaya yang bertujuan yaitu :

- Menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam produksi.
- Menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga (*pricing*) dan keputusan tentang komposisi produk (*product mix*).
- Menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan.

3. Siklus keuangan.

Siklus ini mencakup kegiatan untuk mendapatkan laba dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Siklus ini merupakan pelaporan keuangan berupa prosedur pencatatan dan perekaman ke jurnal dan buku besar dan pencetakan laporan-laporan keuangan yang datanya diambil dari buku besar.

Sistem aplikasi dalam siklus keuangan yaitu :

Sistem pemilikan.

Sistem catatan jurnal.

- Sistem pelaporan keuangan.

a. Batasan aplikasi siklus keuangan yaitu:

Siklus laporan keuangan ini menunjukkan pada kesatuan eksternal dengan meringkas data akuntansi dan menunjukkannya dalam rekening keuangan.

b. Subsistem aplikasi siklus keuangan yaitu :

- sistem pemilikan.
- sistem catatan jurnal.
- Sistem pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada CV. Sinar Jaya Buana Baubau yang beralamat di jalan Bataraguru No.35 Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau. Objek penelitian ini yaitu penerapan sistem akuntansi pada CV. Sinar Jaya Buana Baubau tahun 2014.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa penerapan sistem informasi akuntansi pada CV Sinar Jaya Buana Baubau. Data Kuantitatif berupa bukti-bukti transaksi yang terjadi hingga tahun 2014 pada CV Sinar Jaya Buana Baubau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari CV Sinar Jaya Buana Baubau melalui wawancara yang dilakukan secara langsung, data sekunder merupakan pelengkap atau pendukung data primer yang mencakup formulir dan dokumen pelengkap lainnya.

C. Variabel yang dianalisis

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi.

D. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif yang mencakup pengumpulan data, data yang disusun dan diolah dianalisis sehingga mendapatkan gambaran mengenai masalah yang ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan pada CV. Sinar Jaya Buana Baubau terkait dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang dijalankan di perusahaan tersebut adalah diketahui bahwa CV. Sinar Jaya Buana telah menjalankan sistem informasi akuntansi. Namun, sistem informasi yang dijalankan masih sederhana. Sistem Informasi Akuntansi yang dijalankan pada CV. Sinar Jaya Buana melalui tiga tahapan yaitu input (masukan), proses, dan output (hasil). Tahapan yang pertama (input) ini dimulai dengan mengumpulkan semua bukti-bukti nota penjualan semen Holcim setiap terjadi penjualan semen Holcim baik secara tunai maupun kredit, selain itu pendapatan lain berupa sewa kendaraan yang dibebankan kepada konsumen untuk pengantaran semen Holcim keluar kota, pembayaran upah buruh, pembayaran gaji pegawai, dan pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan setiap pengantaran barang dagang luar kota juga dimasukkan sebagai input (masukan). Tahap yang kedua dalam sistem informasi akuntansi yaitu proses. Proses ini dimulai dengan melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dan dilakukan posting ke buku besar.

Didalam jurnal umum yang dibuat oleh CV. Sinar Jaya Buana Baubau, semua transaksi yang terjadi dicatat mulai dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan semen Holcim dan sewa kendaraan yang dibebankan kepada konsumen. Untuk pengantaran semen keluar kota, pihak CV. Sinar Jaya Buana masih menggunakan kendaraan yang dimiliki oleh Toko Mitra Kencana, pihak CV. Sinar Jaya Buana hanya perlu mengeluarkan dana untuk membeli bahan bakarnya saja. Untuk setiap pengantaran keluar kota, pihak CV. Sinar Jaya Buana membeli bahan bakar solar sebesar Rp. 250.000,00 untuk satu kali pengantaran.

Dalam satu kali pemesanan barang, biasanya CV. Sinar Jaya Buana memesan semen sebanyak 2.880 zak yang dimuat ke dalam 6 container. Harga perolehan semen Holcim dari distributor Surabaya untuk satu sak semen yaitu sebesar Rp. 35.500,00. Dari Surabaya, semen Holcim dikirim ke Baubau dengan menggunakan jasa ekspedisi Buton Mandiri Perdana dengan biaya pengiriman untuk 1 container sebesar Rp. 8.900.000,00. 1 container dapat memuat 480 zak semen Holcim. Jadi untuk sampai ke Baubau, satu zak semen dibebankan biaya sebesar Rp. 18.542,00. Semen Holcim dijual oleh pihak perusahaan seharga Rp. 61.000/zak. Untuk pengantaran di dalam wilayah kota Baubau, pihak perusahaan tidak menarik biaya angkut pengantaran, sedangkan untuk pengantaran keluar kota dibebankan biaya angkut pengantaran sebesar Rp. 500.000 untuk satu kali pengantaran.

1. Laporan HPP

Persediaan Awal	Rp 0
Pembelian I (17 mar 2014)	Rp 102. 240.000
Pembelian II (12 Mei 2014)	Rp 102.240.000
Pembelian III (20 Jul 2014)	Rp 102.240.000
Beban Angk Pembelian I	Rp 53.400.000
Beban Angk Pembelian II	Rp 53.400.000
Beban Angk Pembelian III	Rp 53.400.000
Pembelian Bersih	Rp 466.920.000
Persediaan Akhir	Rp 0
HPP	Rp 466.920.000

2. Laporan Rugi Laba

CV. SINAR JAYA BUANA	
Laporan Neraca	
Per 31 Des 2014	
Pendapatan :	
Penjualan	Rp 591.090.000
Pendapatan Sewa	Rp 11.500.000
Total Pendapatan	Rp 602.590.000
HPP	(Rp 466.920.000)
Laba Kotor	Rp 135.670.000
Beban Usaha :	
Beban upah	Rp 4.925.000
Beban Gaji	Rp 39.900.000
Beban Pemb BBM	Rp 5.750.000
Total Beban	Rp 50.575.000
Laba Bersih	Rp 85.095.000

3. Laporan Perubahan Modal

CV. SINAR JAYA BUANA	
Laporan Neraca	
Per 31 Des 2014	
Modal Awal	Rp 300.000.000
Laba Bersih	Rp 85.095.000
Prive	(Rp 26.200.000)
Modal Akhir	Rp 358.895.000

4. Neraca

CV. SINAR JAYA BUANA			
Laporan Neraca			
Per 31 Des 2014			
Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar :		Hutang :	
Kas	Rp 383.470.000	Hutang Gaji	Rp 4.200.000

Piutang	Rp 0	Prive	Rp 26.200.000
Perlengkapan	Rp 125.000	Modal :	
Aktiva tetap		Modal	Rp 358.895.000
Peralatan	Rp 5.700.000		
Total Aktiva	Rp 389.295.000	Total Pasiva	Rp 389.295.000

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan kepada CV. Sinar Jaya Buana, dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasinya.

1. Input (masukan), dimaksud berupa dokumen-dokumen transaksi yang ada di CV. Sinar Jaya Buana, diantaranya yaitu:
 - a. Nota, dibuat pada saat terjadi pembelian semen baik secara cash maupun kredit. Nota yang dibuat oleh perusahaan ini sudah mencakup jumlah barang yang dipesan dan berapa harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Nota penjualan barang dagang (semen Holcim) dapat dilihat pada lampiran skipsi.
 - b. Nota pembelian barang dagang, Nota pembelian yang diterima oleh pihak perusahaan dari distributor asal surabaya. Nota pembelian ini merincikan jumlah barang yang dipesan serta jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan.
 - c. Catatan-catatan pengeluaran kas harian, adalah rincian yang dibuat oleh bagian pembukuan untuk mencatat uang yang keluar dari kas perusahaan yang digunakan untuk membayar upah bagi para buruh jika ada pengantaran barang (semen Holcim).
2. Proses, Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. Setelah mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut diatas, maka bagian pembukuan perusahaan mulai mencatatnya kedalam buku jurnal umum dan buku besar . Dalam pembuatan jurnal umum, pihak perusahaan tidak pernah mencatat pengeluaran kas untuk membeli perlengkapan kantor seperti folpen, kertas, buku ekspedisi, dan lain-lain. Untuk mengeluarkan kas perusahaan mereka cukup memberitahukannya saja kepada pemilik perusahaan.
3. Output (keluaran), Output yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang berupa laba rugi perusahaan. Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, masih terdapat kekeliruan sedikit yaitu beban penyusutan tidak dimasukan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi laba yang disajikan dalam laporan yang dibuat oleh staf pembukuan.

Berikut ini adalah laporan keuangan CV. Sinar Jaya Buana:

- a. Laporan Laba/Rugi, adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laporan laba/ruginya.

Penjualan semen Holcim sampai periode 31 Desember 2014 sebesar Rp. 545.340.000 atau sebanyak 8.940 zak dengan harga per zaknya sebesar Rp. 61.000,00. Selain memperoleh pendapatan dari penjualan semen, pihak perusahaan juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 setiap satu kali pengantaran keluar daerah, pihak perusahaan menarik biaya pengiriman sebesar Rp. 500.000,00. Rp. 250.000,00 dipakai untuk membeli bahan bakar minyak. Dalam 1 kali pengantaran, kendaraan yang digunakan pihak perusahaan hanya mampu menampung 150 zak semen saja. Total biaya yang dikeluarkan selama operasi

perusahaan yaitu sebesar Rp. 50.575.000. Laba bersih yang diperoleh CV. Sinar Jaya Buana per 31 Desember 2014 adalah Rp. 85.095.000,00. Dalam penyajian laporan Laba/Ruginya, CV. Sinar Jaya Buana tidak menyertakan dengan akumulasi penyusutan peralatan kantornya. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi perolehan Laba/Rugi yang disajikan.

- b. Laporan Perubahan Modal, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan ekuitas terdiri dari saldo awal modal pada neraca saldo setelah disesuaikan ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan prive. Pada awal berdirinya CV. Sinar Jaya Buana, modal yang digunakan untuk operasi perusahaan yaitu Rp. 300.000.000,00. Modal itu digunakan untuk membeli barang dagang dan juga segala keperluan kantor yang dibutuhkan. Selama tahun 2014 ini, pihak CV. Sinar Jaya Buana memperoleh laba bersih sebanyak Rp. 85.095.000,00. Selain itu pemilik perusahaan juga mengambil sejumlah dana dari kas perusahaan sebesar Rp. 26.200.000,00. Dengan perolehan laba itu, maka modalnya pun bertambah di akhir periode menjadi Rp. 358.895.000,00. Walaupun laba yang diperoleh belum begitu besar, namun hal itu dapat menjadi motivasi agar pihak CV. Sinar Jaya Buana dapat membesarkan lagi skala perusahaannya agar dapat terus berkembang.
- c. Laporan Neraca, adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal pada periode tertentu. Pada laporan neraca yang dihasilkan CV. Sinar Jaya Buana sudah menggambarkan posisi antara aktiva dan passiva perusahaan yang seimbang, yaitu sampai pada periode 31 Desember 2014 sebesar Rp. 389.295.000. Namun aktiva yang dimiliki CV. Sinar Jaya Buana masih sangat sedikit, hal ini dikarenakan CV. Sinar Jaya Buana masih menempati tempat yang sama dengan Toko Mitra Kencana untuk sementara waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada CV. Sinar Jaya Buana Baubau, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh CV. Sinar Jaya Buana masih sederhana.
2. Laporan laba/rugi yang disajikan perusahaan masih belum sempurna karena dalam penyajiannya di akhir periode tidak dimasukkan dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap dan juga biaya-biaya kecil yang dikeluarkan setiap harinya diabaikan.
3. Dalam penyajian neraca, perusahaan masih mengalami kesulitan dalam hal pembagian aset perusahaan, karena dari awal pembentukan CV. Sinar Jaya Buana ini sendiri masih menggunakan aset-aset dari Toko Mitra Kencana.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa, penulis mencoba mengemukakan saran-saran dan kiranya dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan sebaiknya tidak hanya dengan laporan keuangan yang sederhana, tetapi juga menggunakan sistem komputerisasi yang lebih modern sehingga proses pembuatan pembukuannya lebih efektif.
2. Sebaiknya diadakan pemisahan antara aset yang dimiliki oleh pihak CV. Sinar Jaya Buana dengan Toko Mitra Kencana agar tidak menimbulkan kekeliruan

pada saat pencatatan laporan keuangan yang harus dilaporkan setiap periode yang sudah ditetapkan.

3. Dalam penyajian laporan laba/rugi, perusahaan sebaiknya juga harus mencantumkan dengan akumulasi penyusutan aktiva tetapnya serta jangan lupa mencatat semua uang yang keluar dari kas perusahaan walaupun jumlahnya sedikit. Karena hal ini menyebabkan kas perusahaan berkurang dan dapat mempengaruhi laba/rugi perusahaan.

DAFTAR ISI

- CV. Sinar Jaya Buana. 2015. *Laporan Keuangan Tahun 2014*.
- Freska Azwin Siregar. 2003. *Sistem informasi akuntansi pada PT. Wahana*. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Hanim, Sustika. 2006. *Penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. Bank Agroniaga Medan*. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Hanif Al Fatta. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi Keuangan*. Badan penerbit akuntansi YKPN: Yogyakarta.
- H.Bodnar, George, William S.Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 9*. Penerbit Andi:Yogyakarta.
- <http://ando-jefri.blogspot.com/2011/10/siklus-akuntansi-siklus-pendapatan-html>
- <http://sella10p.wordpress.com/2014/01/22/siklus-aplikasi-sistem-informasi-akuntansi/>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba empat: Jakarta.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Jusuf, A.A, 1996. *Sistem Informasi Akuntansi*.Salemba Empat: Jakarta.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua*. Salemba Empat:Jakarta.
- SAK ETAP. 2015. Salemba empat: Jakarta
- Siswoyo. 2006. *penerapan sistem informasi akuntansi pada PT. Al Wihdah Jaya Sentosa Medan*. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Suharni, Michell. 2006. *Pelaporan Keuangan Sesuai dengan Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.
- Sutanta, Edhy. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Sutabri. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- V. Rama Dasaratha, Frederick L.Jones.2006. *Sistem Informasi Akuntansi. Buku 2*. Salemba empat: Jakarta.
- Yusuf, Haryono. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi Jijid 2*. Bagian penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN: Yogyakarta.
- Zaki,Baridwan. 2002. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, Edisi 5*. Badan penerbit FE-UGM: Yogyakarta.

**PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN UKURAN
PERUSAHAAN, TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA
PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN KOMPONEN**

Wa Ode Suwarni

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan)

A B S T R A C K

The purpose of this study was to analyze the influence of the effect of liquidity, profitability and company size on capital structure in the automotive and component sector companies. In this study, the sampling technique used was purposive sampling method using certain criteria. The sample in this study amounted to 10 companies. Multiple linear correlation test obtained multiple linear correlation value (R) of 0.645. This means that the correlation coefficient between the variables of Liquidity, Profitability and Company Size on Capital Structure. Based on the results of the data analysis, the SPSS processed significance of the F test was 0.003. Because it has a significance value smaller than α (0.05), which is 0.003, this indicates that liquidity, profitability and firm size have a significant effect on capital structure. From the results of the t test, it can be seen that liquidation has an effect on the capital structure while profitability and firm size have no effect on capital structure.

Keywords: Liquidation, Profitability, Company Size, Capital Structure

**Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan, Terhadap
Struktur Modal Pada Perusahaan Tomotif Dan Komponen**

PENDAHULUAN

Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan mengembalikan kewajibannya. Profitabilitas merupakan rasio penting dalam laporan keuangan. Karena tujuan utama dari perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas sangat penting untuk para investor ekuitas dan kreditur, serta para pengguna laporan tahunan. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan sektor Otomotif dan Komponen. Struktur modal yang baik akan memberikan dampak kepada perusahaan dan secara tidak langsung akan mengubah posisi finansial perusahaan menjadi meningkat dan nilai perusahaanpun akan tinggi.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur (sub sektor otomotif dan komponen) pada Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). Dari 10 perusahaan manufaktur sektor otomotif dan komponen menunjukkan nilai rata-rata total aktiva tahun 2015 sebesar

31.124.465.813.868 dan tahun 2016 sebesar 33.058.875.857.242. Selanjutnya nilai rata-rata aktiva lancar tahun 2015 sebesar 13.310.570.896.149 dan pada tahun 2016 sebesar 13.920.550.819.691. Nilai rata-rata hutang lancar tahun 2015 sebesar 9.925.579.203.911 dan pada tahun 2016 sebesar 11.186.805.090.285. Berdasarkan rata-rata-rata yang telah diuraikan, perusahaan yang memiliki total aktiva, aktiva lancar dan hutang lancar terbesar adalah PT. Astra International Tbk. Total aktiva yang dimiliki PT. Astra International Tbk. pada tahun 2015 sebesar Rp. 245.435.000.000.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 261.855.000.000.000. Selanjutnya aktiva lancar pada tahun 2015 sebesar Rp. 105.161.000.000.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 110.403.000.000.000 dan untuk hutang lancar pada tahun 2015 sebesar Rp. 76.242.000.000.000 pada tahun 2016 sebesar Rp. 76.242.000.000.000.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan sektor Otomotif dan Komponen.

TINJAUAN TEORI

A. Likuidasi

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan. Pengendalian yang cukup diperlukan untuk mempertahankan kelancaran dan kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan oleh karyawan perusahaan. Likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek (Van Horne dan Wachowicz, 2007:232). Rasio likuiditas dapat dihitung berdasarkan informasi model kerja pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar (Sawir, 2009:77).

B. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam periode tertentu (Riyanto, 2011:98). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat aktiva, penjualan dan modal. Ada tiga jenis rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, antara lain: *Net profit margin*, *Return on asset*, *Return On Equity* (ROE).

C. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dll, (Brigham dan Houston, 2010:4). Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dari berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Sedangkan menurut (Edy Suwito dan Arleen Herawaty, 2005) Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005) ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu: “perusahaan besar (*large firm*), perusahaan

menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ini didasarkan kepada total asset perusahaan”.

D. Struktur Modal

Struktur modal (*capital structure*) merupakan kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang jangka panjang yang akan digunakan agar bisa optimal. Dengan adanya struktur modal yang optimal maka perusahaan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal pula, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan dan para pemegang saham pun akan memperoleh keuntungan tersebut (Brigham dan Houston, 2006:7)

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kantor galeri investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) Unidayan yang beralamat di Jln. Sultan Dayanu Ikhsanuddin.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan Sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Dengan jumlah keseluruhan perusahaan Manufaktur sub sektor Otomotif dan Komponen yang berjumlah 13 perusahaan dan Jumlah sampel yang memenuhi kriteria yakni berjumlah 10 perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Grafik Rata-Rata Nilai Tahunan *Current Ratio*

Berdasarkan gambar 2 tercermin perkembangan rata-rata nilai tahunan *current ratio* dari 10 perusahaan otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Nilai rata-rata *current ratio* tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 247,44%. Peningkatan grafik rata-rata nilai tahunan dalam sampel penelitian disebabkan oleh kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki.

Grafik Rata-rata Nilai Tahunan *Return on Asset*

Berdasarkan gambar 2 tercermin perkembangan rata-rata nilai tahunan *current ratio* dari 10 perusahaan otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Nilai rata-rata *current ratio* tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 3,66%. Naik turunnya grafik rata-rata nilai tahunan pada sampel penelitian disebabkan oleh laba penjualan yang tidak stabil, kemudian disusul oleh penurunan pada total aktiva.

Grafik Rata-Rata Nilai Tahunan Ukuran Perusahaan

Berdasarkan gambar 6.1 tercermin perkembangan rata-rata nilai tahunan *size* dari 10 perusahaan manufaktur sektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Nilai tertinggi ada pada tahun 2016 sebesar 29,294. Kenaikan rata-rata nilai tahunan disebabkan oleh perolehan aktiva rata-rata sampel pada perusahaan semakin meningkat, peningkatan ini terjadi. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan akan diperoleh pendapatan sebelum pajak.

Grafik Rata-rata nilai Tahunan *Debt to Equity Ratio*

Berdasarkan gambar 6.1 tercermin perkembangan rata-rata nilai tahunan DER dari 10 perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Nilai tertinggi ada pada tahun 2015 sebesar 102,83%. Penurunan grafik rata-rata nilai tahunan sampel penelitian disebabkan oleh besarnya total utang yang dimiliki perusahaan di bandingkan total ekuitas. Selain itu, disebabkan ketidakstabilan total ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam sampel penelitian selama periode berjalan. Selain itu semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* berarti komposisi hutang semakin tinggi, sehingga akan berakibat pada semakin rendahnya kemampuan perusahaan untuk membayar *dividend payout ratio* (DPR) kepada pemegang saham sehingga rasio pembayaran dividen semakin rendah.

Perhitungan Regresi

Berdasarkan hasil analisis data di olah SPSS pada lampiran 4 tabel ke 5, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0.887 + 0.082X_1 - 0.254X_2 - 2.696X_3$$

A. Koefisien Korelasi Linear Berganda (R)

Uji korelasi linear berganda diperoleh nilai korelasi linear berganda (R) sebesar 0,645. Artinya bahwa koefisien korelasi antara variabel Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal.

B. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis data diolah SPSS pada lampiran 4 tabel ke 3, diketahui bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan nilai R^2 sebesar 0,416. Hal ini menunjukkan variabel Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal sebesar 41,6%, sedangkan sisanya 58,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

C. Uji F

Berdasarkan hasil analisis data diolah SPSS signifikansi uji F sebesar 0,003. Karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α (0,05) yaitu sebesar 0,003, maka hal ini menunjukkan bahwa Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diolah SPSS signifikansi uji F sebesar 0,003. Karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α (0,05) yaitu sebesar 0,003, maka hal ini menunjukkan bahwa Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu struktur modal. Sehingga hipotesisi yang menyatakan bahwa diduga ukuran perusahaan, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada 10 perusahaan manufaktur (sub sektor

otomotif dan komponen) yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abraham dkk (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan, Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mengenai Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal diperoleh hasil sebagai berikut:

Korelasi linear berganda diperoleh nilai R sebesar 0,645. Artinya bahwa koefisien korelasi antara variabel Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal.

Koefisien determinasi R Square adalah sebesar 0,416%. Hal ini berarti variabel Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal sebesar 41,6%. Sedangkan sisanya sebesar 58,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model seperti: Stabilitas penjualan, Struktur asset, Leverage operasi, Tingkat pertumbuhan, Pajak, Kendali, sikap manajemen, dan lainnya.

Selanjutnya hasil analisis data secara simultan uji F Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal.

Saran untuk peneliti berikutnya dapat memperluas pengamatan dengan mengambil seluruh perusahaan manufaktur tidak hanya pada perusahaan Otomotif dan komponen yang listing di BEI. Selain itu juga menambahkan variabel penelitian seperti Stabilitas penjualan, Struktur asset, Leverage operasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy (2015). “ Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis perekonomian Daerah”, Blog Syukriy Abdullah. [https://syukriy.wordpress.com/otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah/](https://syukriy.wordpress.com/otonomi-daerah-sebagai-upaya-memperkokoh-basis-perekonomian-daerah/).
- Brigham Eugene F dan Houston (2013).” Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta. Salemba : Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.2- cet. 10. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diamond, Jack, 2012, “Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?”.*IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department*.
- Ghozali,Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Tegel: PenerbitUniversitas Diponegoro.
- Hehanussa, Salomi J. (2015) “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan

- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon". 2ⁿ Cbam Vol.2 No 1.h. 82-91
- Ira 2013, kutipan Saleba 2014 "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jones, D. B, 1985." The Needs of Users of Governmental Financial Reports". *Government Accounting Standards Board*.
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2012, *Public Sector Accounting*, 5th Edition, Prentice Hall, London
- Kasmir, (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Raja Grafindo
- Mardiasmo, 2012, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, kota pekanbaru*
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ed. II; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mulyana, Budi, (2015). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, pp, 65-78.
- Munawir (2010). Nalisis Laporan Keuangan. Liberty. Yogyakarta
- Neter, John; William Wasserman dan G.A. Whitmore, 1993, *Statistics*, 4th Edition:
- Ramadhani, Yesi, dkk (2014). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Study Pada Provinsi Riau)". *Jom Fekon* Vol. 1. no. 2. h 1-15
- Scott, W.R., 2013, *Financial Accounting Theory*, 3th Ed, Prentice Hall International, Inc, New Jersey. Shende, Suresh dan Tony Bennet, 2004, Concept Paper 2: "Transparency and Accountability in Public Financial Administration", UNDESA.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2015, *Metoda Penelitian Bisnis*, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.
- Umar, 2014, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Werner R Murhadi, (2013). "Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham. Jakarta : Salemba Empat
- Zaki Baridwan (2010). *Intermediate Accounting Edisi 5* & Yogyakarta BPFE-Yogyakarta

ISSN : 2527 - 3019

ISSN : 2527 - 3019

Jurnal Ilmiah Ek onomika dan Bisnis

Volume 4, Nomor 1, Mei 2019

KETENTUAN PENULISAN JURNAL

1. Substansi Artikel. Artikel yang diserahkan merupakan tulisan ilmiah dengan kuantitatif maupun kualitatif berupa : studi pustaka, studi empiris, ataupun studi kasus, sebagai hasil pengembangan Ilmu Ekonomika dan Bisnis. Artikel yang disumbangkan dalah artikel orisinil yang belum pernah dipublikasikan di media lain dan menggunakan pustaka acuan matakhir, porposi terbitan.
2. Teknis Penulisan. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa inggris yang baku. Artikel memuat judul, nama penulis berserta keterangan dan alamat kerja yang jelas. Penulis abstrak dibatasi maksimum sampai 300 kata, untuk artikel Indonesia, abstrak di tulis bahasa Inggris dan sebaliknya, disertai kata kunci (*keyword*). Bagian utama artikel ditulis dengan sistematika : Pendahuluan, Tujuan Penelitian, Tinjauan Teori, Metodologi, Analisis dan Pembahasan, Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka. Setiap judul baik sub judul tulisan perlu diberikan HURUF TEBAL SEMUA, penyajian gambar, table, bagan, dan pendukung lain harus disertai dengan nomor urut, dan sumber yang konsisten.
3. Seleksi Artikel. Artikel yang masuk keredaksi akan diselesksi dan direview oleh anggota dewan redaksi da nada kemungkinan untuk di edit dan /atau dikembalikan untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi. Artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan. Artikel yang dimuat merupakan hak redaksi dan dapat ditampilkan dalam media lain unutk akademik. Isi artikel di luar tanggung jawab redaksi.
4. Penyerahan Artikel. Artikel yang akan dimuat dapat dikirim/diserahkan berupa print-ou ketikan dan dalam bentuk file Microsoft word yang bias dibuka dengan baik. Artikel divetak pada kertas A4 atatu flio, spasi 1.5, huruf dengan Times New Roman 12, dimana Jumlah halaman 12 -15 Halaman.